



Sinergi dan Kolaborasi Pusat dan Daerah

PERDAGANGAN *dan* POLITIK

**Singgasana Geoeconomi:
Pax Americana vs. Pax Sinica**

Jonathan Ersten Herawan

**Menjawab Tantangan
Global: Strategi Penguatan
Ekspor Jawa Timur**

Ciplis Gema Qori'ah

**Ekspor dan Euforia:
Pelajaran dari Kessler
Syndrome untuk
Indonesia dalam Era
RCEP**

Yulius Pratomo

**Kemitraan Ekonomi
Indonesia-Tiongkok:
Tantangan dan Peluang di
Tengah Dinamika Global**

Djauhari Oratmangun

**Indonesia Dalam Pusaran
Neo Geopolitik**

F. Harry Sampurno

**Udang Primadona Ekspor
Perikanan Indonesia: Kini
dan Nanti**

Nimmi Zulbainarni

**Aroma yang Membelah
Samudra: Sejarah Panjang
Rempah Nusantara**

Faiz Nursyahbari

**Strategi Ketahanan
Indonesia di Tengah
Perang Tarif AS**

Maxensius Tri Sambodo

**Menghidupkan Jalur
Rempah: Menilik Kembali
Hubungan Dagang
Indonesia-Afrika Selatan**

Salman Al Farisi

**Prospek Ekspor dan
Hilirisasi Timah di Tengah
Memanasnya Situasi
Geopolitik Timur Tengah**

Reniaty

**Pangan Jadi Peluru,
Dagang Jadi Perang:
Ketahanan Pangan
Indonesia di Tengah
Krisis Geopolitik Global.**

Ofanto dan Elfindri

PENERBIT

Bidang Pengembangan Akademik & Riset Pengurus Pusat ISEI

Pemimpin Umum

Perry Warjiyo

Penanggung Jawab

Solikin M. Juhro

Ketua Dewan Redaksi

Hermanto Siregar

Dewan Editor Ahli

Christantius Dwiatmadja
Suharnomo
Jaka Sriyana
Yohanes B. Kadarusman
M.Firdaus
Sahara

Manajemen Redaksi

Anika Faisal
Lisawati
Aviliani
Yoga Affandi
Antonius Widodo

Redaktur Pelaksana

Firman Sihol Parningotan

Wakil Redaktur Pelaksana

Jonathan Ersten Herawan

Keuangan

Efrilia Sukmagraha

Desain dan Layout

Najmah Faisal
Fabritio Paulus Kumowal

Kantor Redaksi

Achmad Kusnadi
Nuni Purwahyuni
Suswanto
Rudi Rianto

Disclaimer:

Opini, laporan dan informasi yang dimuat dalam majalah ini merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan resmi redaksi Warta ISEI.

ISEI MENYAPA

Sambutan Redaktur Pelaksana WARTA ISEI

01

Indonesia Dalam Pusaran Neo Geopolitik

25

F. Harry Sampurno, Ph.D.

OPINI

Singgasana Geoekonomi: Pax Americana vs. Pax Sinica

03

Pangan Jadi Peluru, Dagang Jadi Perang: Ketahanan Pangan Indonesia di Tengah Krisis Geopolitik Global

27

Ofanto dan Elfindri

Jonathan Ersten Herawan

Kemitraan Ekonomi Indonesia-Tiongkok: Tantangan dan Peluang di Tengah Dinamika Global

05

KEGIATAN ISEI

ISEI Dorong Soemitronics Sebagai Strategi Pembangunan Nasional

31

Djauhari Oratmangun

Udang Primadona Ekspor Perikanan Indonesia: Kini dan Nanti

07

Peran ISEI Tingkatkan Produktivitas Ekonom Muda

32

Dr. Nimmi Zulbainarni, S.Pi., M. Si

Guncangan Perdagangan Global: Mengukur Risiko dan Peluang Indonesia di Era Trump 2.0

09

Sahara, Syarifah Amaliah, Reza Legina Putri, Muhammad Fazri, Radja Ahmad Nur Fikri, dan Fabritio Paulus Kumowal

Ekspor dan Euforia: Pelajaran dari Kessler Syndrome untuk Indonesia dalam Era RCEP

12

Yulius Pratomo

Prospek Ekspor dan Hilirisasi Timah di Tengah Memanasnya Situasi Geopolitik Timur Tengah

14

Dr. Reniati, S.E., M.Si

Vulnerability Ekspor dan Impor Daerah Istimewa Yogyakarta

16

Dr. Rudy Badrudin

Aroma yang Membelah Samudra: Sejarah Panjang Rempah Nusantara

17

Faiz Nursyahbari

Menjawab Tantangan Global: Strategi Penguatan Ekspor Jawa Timur

19

Dr. Ciplis Gema Qori'ah

Strategi Ketahanan Indonesia di Tengah Perang Tarif AS

21

Maxensius Tri Sambodo

Menghidupkam Jalur Rempah: Menilik Kembali Hubungan Dagang Indonesia-Afrika Selatan

23

Salman Al Farisi

ISEI MENYAPA

Salam sejahtera pembaca setia Warta ISEI,

Di tengah dinamika global yang terus bergulir begitu cepat, majalah Warta ISEI kembali hadir dengan edisi yang sarat akan wawasan dan analisis mendalam mengenai berbagai isu strategis yang sangat relevan untuk Indonesia dan dunia. Kondisi dunia yang dipenuhi ketidakpastian, mengharuskan kita lebih adaptif dan inovatif terutama bagi dunia usaha.

William Arthur Ward pernah mengatakan *"The pessimist complains about the wind; the optimist expects it to change; the realist adjusts the sails."* yang artinya diperlukan pendekatan realistis dalam kebijakan pragmatis.

Tema penting yang diangkat Warta ISEI edisi ini dimulai dari menghidupkan jalur rempah yang menelusuri kembali hubungan dagang antara Indonesia dan Afrika Selatan hingga bahasan tentang Ekspor dan Euforia yang mengambil pelajaran dari Kessler Syndrome dalam konteks era RCEP. Hal ini menjadi penting bahwa Indonesia harus melakukan diversifikasi pasar ekspor dan tetap menjalankan politik "bebas aktif".

Artikel lainnya dimana Indonesia sebagai negara maritim yang kaya akan rempah dan sumber daya alam, terus menghadapi tantangan besar dalam menjaga ketahanan ekonominya. Melalui artikel-artikel seperti strategi ketahanan Indonesia di tengah perang tarif AS, *vulnerability* ekspor dan impor Daerah Istimewa Yogyakarta, serta artikel yang menjawab tantangan global: strategi penguatan ekspor di Provinsi Jawa Timurbahkan yang tidak kalah menarik, ulasan tentang komoditas udang sebagai primadona ekspor perikanan Indonesia juga menjadi artikel yang menarik untuk dicermati.

Fokus Pemerintah dalam menjalankan program hilirisasi juga menjadi poin penting dalam pembahasan dimana hilirisasi timah dibahas dengan tidak melupakan hulu serta unsur lokal yang seharusnya dapat mendukung program hingga berorientasi ekspor. Di samping itu, edisi ini juga menyoroti hubungan geo-ekonomi yang kian kompleks, seperti Kemitraan Ekonomi Indonesia-Tiongkok, yang penuh tantangan dan peluang, serta persaingan global yang memperebutkan Singgasana Geoekonomi antara Pax Americana dan Pax Sinica. Tak lupa, sejarah panjang rempah nusantara dalam Aroma yang Membelah Samudra memberikan perspektif mendalam atas akar kekuatan dagang Indonesia. Namun, tidak dapat kita abaikan pula bahwa dunia menghadapi ketegangan geopolitik yang semakin meningkat. Konflik-konflik terkini seperti perang Israel-Iran, ketegangan di Myanmar, potensi konflik baru di Greenland dan Selat Hormuz, serta rivalitas strategis yang terus memanas antara AS dan China, khususnya terkait isu decoupling dan kemungkinan rivalitas di Taiwan dan kawasan Asia Tenggara perlu menjadi perhatian kita semua.

Konsep *Cooperative – Competitive* yang dikemukakan Morton Deutch dan dikembangkan oleh David W. Johnson dapat menjadi guideline dalam menghadapi berbagai ketidakpastian kedepan. Dimana konflik antar kelompok telah membentuk psikologi dan perilaku manusia khususnya, filosofi keseimbangan Yin-Yang dapat menjadi perhatian khusus dalam mengutamakan keseimbangan bagi *global prosperity*.

Melalui berbagai artikel terpilih dalam edisi ini, kami berharap para pembaca dapat menggali inspirasi, wawasan kritis, serta strategi yang relevan untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di tengah kancah global yang semakin dinamis.

Selamat membaca dan semoga Warta ISEI edisi ini menjadi sumber informasi yang bermanfaat dan memperkaya sudut pandang kita semua.

Salam hangat,
Firman Sihol Parningotan
 Redaktur Pelaksana Warta ISEI





TRANSAKSI DI LUAR NEGERI

DENGAN POKET VALAS DI

**my
BCA**

**16 MATA UANG
ASING**

**DEBIT/TARIK TUNAI
TANPA KONVERSI KURS**

**TOP UP
VALAS 24/7**

AKTIFKAN SEKARANG

bca.id/poket

#NYAMANNYAMENDUNIA

Opini

Singgasana Geoekonomi: Pax Americana vs. Pax Sinica

Oleh **Jonathan Ersten Herawan**

Junior Analis Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI)



“China secara adaptif merangkul kemajuan dengan membuka negaranya ke dunia, sementara Amerika Serikat secara adaptif merangkul kemajuan dengan menutup diri dari dunia.”

Kepemimpinan di Westeros, seperti yang digambarkan dalam serial “Game of Thrones”, sering dipertanyakan melalui karakter Daenerys Targaryen, yang berjuang antara keinginannya untuk membebaskan rakyat dan metode kekerasan yang ia gunakan. Moralitas kepemimpinan menjadi pertanyaan utama di mana seorang pemimpin terkadang menghadapi badai dalam pengambilan keputusan demi mencapai tujuan. Narasi ini relevan untuk menggambarkan perebutan

kekuatan geoekonomi yang sedang berlangsung antara Pax Americana dan Pax Sinica, di mana keduanya mengklaim bahwa keputusan mereka dibuat demi keamanan nasional.

Paradoks Liberalisme-Realisme

Pada 29 Januari 1979, Deng Xiaoping melakukan kunjungan bersejarah ke Amerika Serikat. Pada saat itu, pemimpin revolusioner ini percaya bahwa membawa kemajuan progresif bagi negaranya bukanlah soal isolasi, melainkan tentang beradaptasi dan terlibat dengan dunia. Setelah 46 tahun langkah-langkah progresif Deng, Tiongkok telah menjadi negara yang terbuka, yang dibuktikan dengan semakin menguatnya Pax Sinica yang menekankan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Tiongkok menyadari bahwa stabilitas di Asia selama ribuan tahun telah membawa

benua ini menuju pertumbuhan yang menarik serta perkembangan agama-agama yang beragam seperti penyebaran Hinduisme, Buddhisme, Kristen, dan Islam secara kuat; membuktikan bahwa hanya bangsa-bangsa yang mampu beradaptasi lah yang dapat bertahan di tengah arus globalisasi. Dengan stabilitas yang tercipta melalui jalur perdagangan seperti Jalur Sutra selama berabad-abad sehingga menjadi jalur ideal bagi para pedagang—angka kematian di Asia secara historis lebih rendah dibandingkan benua lain.

Paradoks Liberalisme yang telah membimbing Tiongkok dan sebagian besar dunia selama beberapa abad terakhir kini mulai bergeser dengan diberlakukannya tarif timbal balik oleh Trump terhadap berbagai negara. Pada tanggal 2 April 2025 di Gedung Putih, Trump membuka babak baru dengan menyatakan bahwa pendekatan Amerika terhadap kemajuan progresif berbeda dari strategi Tiongkok; memilih untuk mengisolasi diri sebagai strategi adaptif sekaligus berpaling dari keterlibatan global. Trump sedang mengambil taruhan besar—bukan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri atau partainya—tetapi juga mengenai apakah strategi ini akan membawa Pax Americana menuju kemajuan atau justru mempercepat penyerahan “The Iron Throne” sebagai kursi geoekonomi kepada Pax Sinica.

Langkah-Langkah Tic-Tac-Toe

Sebagai raja di panggung Selatan (Indonesia), kita harus berani menghadapi “House Stark,” atau keluarga-keluarga yang berkuasa dari wilayah Utara. Respons pemerintah terhadap kebijakan tarif timbal balik Trump tidak mencerminkan politik luar negeri bebas-aktif Indonesia karena gagal memberikan kontribusi bagi perdamaian dunia, melainkan lebih condong pada politik netral yang hanya bertujuan untuk mempertahankan diri sendiri.

Pemerintah harus menyelaraskan kebijakan domestik dengan lingkungan

strategis global—terutama peta geopolitik dan lanskap geoekonomi. Ketika Amerika memberlakukan tarif 25% pada industri otomotif; Jepang-Tiongkok-Korea Selatan bersatu menentang keputusan tersebut—lalu apa yang dilakukan Indonesia-Thailand-Malaysia? Indonesia justru abstain untuk memulai dialog di dalam ASEAN.

Indonesia membutuhkan langkah diplomasi strategis, pertama dengan memperkuat berbagai kerjasama perekonomian seperti TIFA, RCEP, EU-CEPA, IA-CEPA, dan berbagai FTA lainnya. Kedua, Indonesia dengan posisi strategis perlu menjadikan negosiasi bukan alat untuk menambah impor semata melainkan kesempatan untuk menjadi hub antara perdagangan US-China dan China-US sebagai "*labelling transshipment*" dimana akan membuka lapangan pekerjaan yang bersifat padat karya. Selanjutnya, Indonesia dapat jemput bola dengan melakukan deregulasi dengan menghapus berbagai *non-tarif measurement* (NTM) agar produk Indonesia lebih kompetitif dengan mencabut kebijakan kuota yang tidak transparan, menghapus berbagai kebijakan tidak pro-market terutama untuk lisensi produk pertanian namun untuk kebijakan TKDN tetap harus dipertahankan namun berbasis investasi bukan sebatas membatasi saja.

Namun dalam kerangka kerja sama multilateral seperti ASEAN kita perlu pendekatan kontralateral dengan mendorong dialog ASEAN plus bersama berbagai mitra Non-AS terlebih dahulu sebelum mencapai kesepakatan atas komoditas-komoditas yang tidak terjual ke pasar AS lalu dilanjutkan dengan usulan diskusi Grouplateral agar ASEAN dapat berdialog bersama kelompok-kelompok seperti BRICS, D-8, MIKTA, OKI dan lain-lain guna mencapai konsensus rantai pasok regional yang melibatkan banyak negara Asia-Afrika aktif di dalamnya.

Sikap politik semacam ini mencerminkan apa yang seharusnya diwujudkan oleh Indonesia karena secara fundamental, kebijakan tarif hanyalah langkah awal yang kecil dan tidak mungkin membawa kita menuju terciptanya perdamaian dunia sebuah strategi politik penting untuk menunjukkan posisi kita terhadap AS sekaligus memaksa mereka melakukan kalibrasi ulang akibat kebingungan atas tindakan-tindakan sejauh ini.

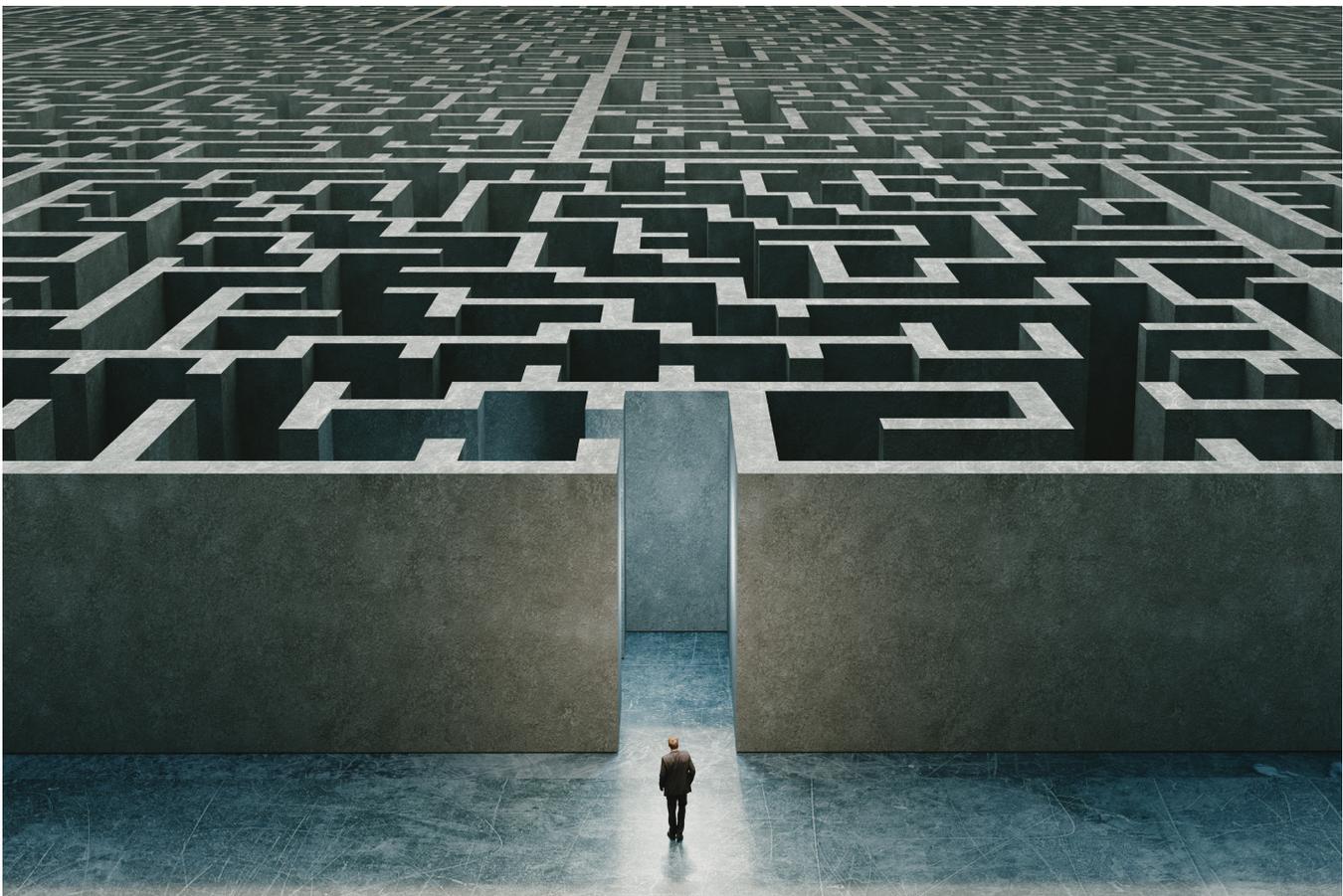
Mempersiapkan Kaliber

Kunjungan Presiden Prabowo ke negara-negara di luar ASEAN pasca-pelantikan menandakan posisi Indonesia yang sejajar dengan kekuatan global utama, menunjukkan penerimaan dari kedua belah pihak baik Pax Americana maupun

Pax Sinica, yang masing-masing mencerminkan perspektif realisme dan liberalisme.

Dengan jumlah penduduk mendekati 280 juta jiwa serta sumber daya alam yang melimpah, seharusnya tidak ada kekhawatiran terkait ketergantungan pada pertumbuhan ekonomi endogen meskipun terdapat kecemasan di sektor tekstil, maritim, dan pertanian, apakah Indonesia akan tetap menjadi *Good Boy* atau berkembang menjadi *Smart Boy*?

Saat ini paradoks antara Realisme-Liberalisme membuktikan keberhasilan yang dicapai di bawah Pax Sinica dengan menunjukkan kemampuan beradaptasi di tengah perubahan zaman serta menjanjikan ketahanan ke depan! "Menjadi peniru ulung" seharusnya menjadi slogan yang membimbing aspirasi Indonesia dalam menavigasi tahta geoekonomi di tengah persaingan dua kekuatan dominan! Musim dingin mungkin datang namun belum tentu berlaku di wilayah tropis!



Opini

Kemitraan Ekonomi Indonesia–Tiongkok: Tantangan dan Peluang di Tengah Dinamika Global

Oleh **Djauhari Oratmangun**

Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Rakyat Tiongkok & Wakil Ketua Bidang Kerjasama Internasional Pengurus Pusat ISEI



Tahun 2025 menandai 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia–Tiongkok. Hubungan ini bukan hanya panjang dalam sejarah, namun juga terus mengalami dinamika, penyesuaian, dan penguatan seiring dengan dinamika global. Salah satu dimensi yang paling mencolok adalah bidang perdagangan dan investasi, yang dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan signifikan.

Pertumbuhan Perdagangan dan Tantangan Diversifikasi

Selama 5 tahun terakhir, volume perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok mengalami pertumbuhan yang signifikan. Berdasarkan data kepabeanaan Tiongkok, total perdagangan bilateral meningkat dari USD 79,7 miliar pada 2019 menjadi USD 147,79 miliar pada 2024.

Ekspor Indonesia ke Tiongkok didominasi oleh komoditas bahan baku industri, seperti besi dan baja, turunan nikel, serta minyak sawit. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia berhasil memperluas pangsa ekspor dengan memasukkan produk-produk agrikultur dan kelautan seperti buah tropis dan hasil perikanan.

Buah naga, manggis, dan kelapa segar asal Indonesia telah diterima pasar Tiongkok, sementara durian Indonesia akan segera menyusul masuk ke pasar, bersaing

dengan produk sejenis dari Thailand dan Malaysia. Untuk perikanan, ekspor ke RRT mencapai 20% dari total ekspor perikanan Indonesia. RRT merupakan negara tujuan ekspor perikanan kedua terbesar, setelah AS.

Bertambahnya produk agrikultur dan perikanan Indonesia di pasar Tiongkok merupakan peluang besar, namun juga menjadi pengingat bahwa diversifikasi ekspor bukan proses yang instan. Tiongkok memberlakukan standar ketat terkait sanitasi, keamanan pangan, dan pelacakan rantai pasok (traceability). Untuk itu, eksportir Indonesia perlu melakukan penyesuaian pada sistem produksi, pengemasan, hingga distribusi agar sesuai dengan regulasi dan ekspektasi pasar Tiongkok.

Hal ini memperlihatkan bahwa tantangan utama dalam diversifikasi bukan hanya pada produk, tetapi juga pada kesiapan

sistem pendukungnya, termasuk kebijakan karantina, harmonisasi standar, serta keberpihakan logistik terhadap produk lokal bernilai tambah tinggi.

Investasi Tiongkok: Dari Hilirisasi ke Diversifikasi Sektor

Selain di bidang perdagangan, investasi Tiongkok di Indonesia juga menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan. Pada tahun 2015, nilai investasi Tiongkok tercatat sebesar USD 628 juta, dan meningkat pesat menjadi USD 8,1 miliar pada 2024. Capaian ini menempatkan Tiongkok sebagai salah satu dari tiga besar investor asing utama di Indonesia.

Dalam beberapa tahun terakhir, fokus investasi Tiongkok banyak diarahkan pada sektor hilirisasi sumber daya alam, khususnya nikel. Menurut data Kementerian ESDM, nilai ekspor produk turunan nikel Indonesia meningkat

tajam dari USD 3,3 miliar pada 2017 menjadi USD 33,9 miliar pada 2024. Lonjakan ini sebagian besar didorong oleh pembangunan smelter dan fasilitas pengolahan yang dibiayai oleh investasi Tiongkok. Kehadiran infrastruktur hilirisasi ini turut memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global, khususnya di sektor energi dan manufaktur.

Namun dalam dua tahun terakhir, mulai terlihat adanya pergeseran arah investasi Tiongkok ke sektor-sektor lain yang lebih beragam. Beberapa sektor yang kini mulai menyerap investasi meliputi energi terbarukan, transportasi, telekomunikasi, kesehatan, dan infrastruktur perkotaan. Sektor-sektor ini dinilai strategis untuk mendukung agenda transformasi ekonomi nasional yang berorientasi pada keberlanjutan, efisiensi energi, dan penguasaan teknologi.

Salah satu contoh nyata adalah keterlibatan Tiongkok dalam pengembangan ekosistem industri kendaraan listrik di Indonesia. Merek-merek seperti Wuling, Chery, dan BYD tidak lagi hanya hadir sebagai produk impor, namun juga mulai diproduksi secara lokal. Ini berpotensi menciptakan efek pengganda bagi industri otomotif nasional, termasuk dalam pembangunan ekosistem rantai pasok, transfer teknologi, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja Indonesia.

Dalam konteks ini, kunjungan Premier Li Qiang ke Jakarta pada Mei 2025 menjadi penanda penting dari keberlanjutan komitmen strategis Tiongkok terhadap Indonesia. Sejumlah proyek besar yang telah berjalan—seperti kereta cepat Jakarta-Bandung, *Two Countries Twin Park*, dan pengembangan kawasan industri hijau, menjadi contoh konkret dari kerja sama jangka panjang yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada integrasi nilai tambah dan keberlanjutan.

Di sisi lain, Indonesia juga tengah mengembangkan berbagai program strategis nasional, antara lain pembentukan Danantara, program makan bergizi gratis, pembangunan rumah rakyat, *giant sea wall*, serta transformasi digital di sektor pertanian dan pendidikan vokasi. Program-program ini membuka ruang kerja sama pembangunan yang lebih luas dengan mitra asing, termasuk Tiongkok.

Secara khusus, pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi salah satu fokus baru dalam kerja sama Indonesia-Tiongkok. Sejumlah perusahaan Tiongkok telah menunjukkan minat untuk berpartisipasi dalam pengembangan kawasan industri pintar, konektivitas digital, dan infrastruktur berbasis teknologi hijau di wilayah ibu kota baru

tersebut. Keterlibatan ini mencerminkan adanya kepercayaan jangka panjang terhadap potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan.

Pergeseran arah investasi Tiongkok menandakan bahwa hubungan ekonomi Indonesia-Tiongkok telah memasuki fase yang lebih strategis. Tidak lagi semata berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam, kemitraan ini mulai bergerak menuju bentuk yang lebih terintegratif, meliputi pembangunan infrastruktur canggih, penguatan basis industri nasional, serta pemanfaatan teknologi untuk mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dinamika Global dan Arah Baru Ekonomi Tiongkok

Tahun 2025 dibuka dengan berbagai dinamika global yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap stabilitas ekonomi kawasan. Eskalasi konflik di Timur Tengah, ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok, serta kekhawatiran akan perlambatan pertumbuhan ekonomi global menjadi faktor eksternal yang memengaruhi iklim usaha dan perdagangan internasional, termasuk bagi Indonesia.

Salah satu dampak yang mulai terlihat adalah tekanan terhadap harga komoditas utama dan gangguan rantai pasok global, yang dapat berimplikasi pada daya saing ekspor dan kestabilan industri dalam negeri. BPS mencatat bahwa lima tahun terakhir neraca perdagangan global Indonesia memang masih surplus. Namun, perlu diperhatikan bahwa tahun 2024 menjadi tahun pertama Indonesia mencatatkan defisit neraca perdagangan dengan Tiongkok, setelah tiga tahun terakhir mengalami surplus. Defisit yang juga dialami oleh negara mitra dagang RRT lainnya tentu tidak lepas dari kondisi global maupun turunnya permintaan domestik Tiongkok.

Sementara itu, Tiongkok, menghadapi ketidakpastian situasi global saat ini, juga terus disibukkan dengan upaya reformasi ekonomi untuk meningkatkan belanja domestik. Beberapa kebijakan konkret yang telah diambil Pemerintah Tiongkok untuk memperkuat belanja domestik, antara lain:

Program *trade-in* untuk mendorong pembelian kendaraan dan peralatan rumah tangga baru,

Kenaikan upah minimum di sejumlah provinsi,

Kebijakan cuti dan libur yang lebih fleksibel untuk meningkatkan mobilitas konsumsi,

Penguatan program sosial guna memperluas daya beli masyarakat lapisan bawah.

Tiongkok juga semakin mengakui peran sektor swasta dalam pertumbuhan ekonomi. Sektor swasta pada tahun 2024 berkontribusi terhadap 60% GDP dan lebih dari 70% inovasi teknologi. Pemerintah Tiongkok kini telah memperkuat regulasi untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan sektor swasta melalui akses pasar yang adil, pendanaan, riset, dan perlindungan hak cipta. Ke depan akan semakin bermunculan teknologi baru seperti yang ditunjukkan oleh DeepSeek dan Unitree Robotics.

Bagi Indonesia, perkembangan ekonomi domestik Tiongkok membawa implikasi: kedepan strategi ekspor yang digunakan perlu berubah. Produk ekspor Indonesia harus mampu menjawab preferensi konsumen akhir Tiongkok, yang kini semakin menuntut kualitas tinggi, keberlanjutan lingkungan, serta nilai tambah. Produk agrikultur, perikanan, makanan olahan, serta produk gaya hidup berbasis budaya lokal memiliki potensi besar jika dikelola dengan strategi pasar yang tepat. Di bidang investasi, Indonesia harus jeli menangkap peluang kerja sama untuk mengadopsi teknologi-teknologi baru.

Dengan kebijakan yang tepat, kemitraan strategis dengan Tiongkok dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional, termasuk dalam mendorong transformasi ekonomi Indonesia yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam kerangka tersebut, KBRI Beijing akan terus berkomitmen untuk memperkuat diplomasi ekonomi, membuka akses pasar baru, memfasilitasi arus investasi yang berkualitas, serta memastikan bahwa setiap kerja sama yang dibangun senantiasa berpihak pada kepentingan nasional Indonesia.

“Kondisi ketidakpastian perekonomian global sedang mengarah dari Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity (VUCA) menjadi Turbulence, Uncertainty, Novelty, dan Ambiguity (TUNA)”

- Solikin M. Juhro-

Opini

Udang Primadona Ekspor Perikanan Indonesia: Kini dan Nanti

Oleh **Dr. Nimmi Zulbainarni, S.Pi., M. Si**

Dosen Sekolah Bisnis IPB, Ketua Focus Group Kelautan dan Perikanan ISEI, dan Sekjen Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN)



Indonesia telah lama dikenal sebagai salah satu negara produsen udang terbesar di dunia. Sebagai komoditas andalan sektor perikanan, udang memberikan kontribusi signifikan terhadap ekspor nasional. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP, 2024), nilai ekspor udang Indonesia pada 2023 mencapai US\$1,73 miliar, setara hampir 28% dari total ekspor produk perikanan sebesar US\$5,95 miliar. Capaian ini menempatkan Indonesia sejajar dengan negara produsen besar lainnya seperti India, Vietnam, Thailand, dan Ekuador dalam peta perdagangan udang dunia.

Namun posisi strategis ini mendapat tekanan serius pada pertengahan 2024, ketika Amerika Serikat (AS) memberlakukan tarif anti-dumping sebesar 6,3% terhadap produk udang

Indonesia. AS selama ini merupakan pasar utama, menyerap sekitar 64% dari total ekspor udang Indonesia. Kebijakan ini berdampak langsung terhadap penurunan kinerja ekspor nasional. Data menunjukkan bahwa ekspor udang anjlok sekitar 8,1% YoY pada kuartal ketiga 2024, dan secara akumulatif sepanjang tahun, nilai ekspor turun hampir 20% dibanding tahun sebelumnya (Kemendag, 2024).

Pemerintah Indonesia menanggapi situasi ini dengan diplomasi perdagangan yang agresif melalui Kementerian Perdagangan dan KKP. Setelah negosiasi intensif, tarif tersebut berhasil diturunkan menjadi 3,9% pada Oktober 2024. Revisi tarif ini membawa dampak positif yang cukup cepat: dalam empat bulan pertama tahun 2025, volume ekspor udang meningkat 11% YoY, dan nilai ekspor melonjak 24%, mencapai US\$575 juta

(KKP, 2025). Rebound ini menjadi bukti bahwa daya saing udang Indonesia tetap tinggi, meskipun sempat terguncang oleh kebijakan proteksionisme global.

Kejadian ini membuka kesadaran pentingnya diversifikasi pasar. Ketergantungan pada satu pasar utama seperti AS terbukti berisiko tinggi. Sejak awal 2025, para eksportir nasional mulai mengarahkan produk ke Jepang, Korea Selatan, Uni Eropa, China, dan Australia. Diversifikasi ini tidak hanya menyebarkan risiko, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas produk karena banyak pasar non-AS memberlakukan standar mutu dan keberlanjutan yang lebih ketat. Ini memacu pelaku industri untuk meningkatkan praktik budidaya dan pengolahan agar sesuai dengan standar internasional.

Namun tantangan domestik tak kalah kompleks. Penyakit budidaya seperti *White Spot Syndrome Virus* (WSSV) dan *Early Mortality Syndrome* (EMS) masih menjadi momok yang menurunkan produktivitas dan meningkatkan biaya operasional. FAO (2024) menyebut bahwa kedua penyakit ini bisa memangkas produksi hingga 50% jika tidak ditangani dengan teknologi dan manajemen yang tepat. Di sisi lain, kerusakan ekosistem mangrove akibat ekspansi tambak yang tidak terkendali mengancam keberlanjutan jangka panjang. Mangrove yang rusak tidak hanya menurunkan kualitas lingkungan tambak, tetapi juga melemahkan ketahanan ekosistem pesisir terhadap perubahan iklim.

Untuk itu, diperlukan transformasi menyeluruh dalam sistem budidaya udang nasional. Pemerintah dan pelaku usaha perlu mempercepat adopsi teknologi biosekuriti seperti *Recirculating Aquaculture System* (RAS) dan *Intensive Biofloc Technology* (IBT). Kedua teknologi ini telah terbukti mampu menekan risiko penyakit sekaligus menjaga efisiensi dan ramah lingkungan. Selain itu, peningkatan investasi dalam riset dan pengembangan benih unggul yang tahan penyakit menjadi kebutuhan mendesak agar Indonesia tidak tertinggal dari negara pesaing.

Penguatan kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi bagian penting dari strategi pembangunan sektor ini. Petambak skala kecil dan menengah yang menjadi tulang punggung produksi nasional masih menghadapi kendala seperti keterbatasan akses modal, teknologi, dan pasar. Penguatan koperasi, penyuluhan teknis, dan skema kemitraan antara petambak dan eksportir besar perlu didorong. Pemerintah harus menciptakan ekosistem yang adil, di mana pelaku kecil mendapat akses pembiayaan, pelatihan, dan infrastruktur dasar seperti *cold storage* dan jalan produksi.

Meningkatnya perhatian dunia terhadap produk berkelanjutan dan beretika, maka konsumen global dituntut untuk adanya sertifikasi keberlanjutan seperti *Aquaculture Stewardship Council* (ASC) atau *Best Aquaculture Practices* (BAP). Indonesia perlu memastikan bahwa udang yang diekspor ke pasar premium telah memenuhi kriteria sosial dan lingkungan. Sertifikasi ini bukan sekadar formalitas, melainkan faktor penentu untuk menembus pasar Uni Eropa dan memperkuat posisi di AS dan Jepang. Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal bagi usaha yang bersertifikasi dan mempercepat proses sertifikasi melalui lembaga domestik yang diakui secara internasional.

Aspek lain yang perlu diperkuat adalah keterpaduan kebijakan lintas sektor. Perikanan budidaya tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan tata ruang, infrastruktur, lingkungan, dan sistem keuangan yang saling terintegrasi. Diperlukan sinergi antara KKP, Kementerian ATR/BPN, KLHK, dan lembaga pembiayaan seperti KUR sektor kelautan untuk mendukung percepatan modernisasi tambak. Pemerintah daerah juga harus proaktif dalam memastikan regulasi dan pengawasan berjalan efektif di lapangan.

Sementara itu, tren pasar global juga menunjukkan bahwa produk olahan udang seperti tempura, *breaded shrimp*, dan *ready-to-eat meals* mulai mendominasi permintaan. Indonesia harus mendorong industrialisasi hilir, termasuk penguatan UMKM pengolah udang agar tidak hanya menjadi eksportir bahan mentah. Hilirisasi ini akan memberikan nilai tambah ekonomi yang besar dan membuka lebih banyak lapangan kerja. Industri pengolahan udang juga harus terintegrasi dengan rantai distribusi dingin yang efisien agar kualitas produk tetap terjaga hingga ke tangan konsumen akhir, terutama di pasar ekspor yang sangat sensitif terhadap standar higienitas dan ketelusuran produk.

Dalam konteks peningkatan daya saing global, penting pula bagi Indonesia untuk terus mengembangkan sistem pelacakan digital atau *traceability system*. Sistem ini memungkinkan eksportir dan regulator melacak seluruh proses produksi, mulai dari asal tambak, metode budidaya, hingga distribusi akhir. Dengan *traceability*, Indonesia tidak hanya memenuhi permintaan konsumen global yang menuntut transparansi, tetapi juga meningkatkan reputasi sebagai negara produsen udang yang bertanggung jawab dan kompetitif.

Dinamika geopolitik dan perubahan iklim turut memengaruhi perdagangan udang dunia. Ketegangan dagang, perubahan tarif, dan risiko iklim seperti kenaikan suhu laut dan badai ekstrem menjadi tantangan nyata. Indonesia perlu membangun sistem ketahanan risiko dari asuransi perikanan, sistem peringatan dini, hingga pemetaan wilayah rawan untuk menjamin keberlangsungan sektor ini di tengah ketidakpastian global. Selain itu, penting untuk memanfaatkan peluang integrasi regional melalui perjanjian perdagangan bebas seperti *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) dan *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA). Perjanjian ini tidak hanya memperluas akses pasar, tetapi juga memberi peluang bagi harmonisasi standar teknis dan penguatan rantai pasok regional. Melalui kerja sama ini,

Indonesia bisa lebih mudah menyalurkan produk udangnya ke negara mitra dagang dengan tarif preferensial dan prosedur yang lebih sederhana.

Perlu juga didorong pendekatan pembangunan berbasis kawasan yang mengintegrasikan pusat-pusat produksi udang dengan pelabuhan ekspor, kawasan industri pengolahan, dan jaringan logistik. Model klusterisasi ini terbukti mampu meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi di berbagai negara. Dengan pendekatan ini, Indonesia bisa membangun kawasan sentra udang berdaya saing tinggi di pesisir Sumatera, Sulawesi, dan Nusa Tenggara.



Langkah strategis lainnya adalah mendorong integrasi digital dan pemanfaatan teknologi 4.0 dalam sektor perikanan budidaya. Teknologi seperti *Internet of Things* (IoT), *Artificial Intelligence* (AI), dan *big data analytics* bisa dimanfaatkan untuk memantau kualitas air, pakan, pertumbuhan udang, serta prediksi cuaca dan penyakit secara real-time. Dengan sistem digital ini, efisiensi produksi akan meningkat dan ketergantungan terhadap tenaga kerja manual bisa dikurangi, sekaligus membuka peluang keterlibatan generasi muda di sektor kelautan yang selama ini kurang diminati.

Dengan diplomasi aktif, diversifikasi pasar, teknologi budidaya berkelanjutan, transformasi digital, serta tata kelola yang inklusif dan adaptif, ekspor udang Indonesia berpotensi menjadi pilar ekonomi biru nasional yang tangguh. Visi ke depan harus menempatkan industri ini sebagai penopang kemandirian ekonomi perikanan sekaligus simbol kepemimpinan Indonesia dalam perdagangan maritim global yang adil dan berkelanjutan.

Opini

Guncangan Perdagangan Global: Mengukur Risiko dan Peluang Indonesia di Era Trump 2.0

Oleh Sahara, Syarifah Amaliah, Reza Legina Putri, Muhammad Fazri, Radja Ahmad Nur Fikri, dan Fabritio Paulus Kumowal

International Trade Analysis and Policy Studies (ITAPS) Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB University dan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI)

Ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok semakin meningkat, terutama sejak kembali mencuatnya kebijakan ekonomi proteksionis dari pemerintahan Trump yang dikenal dengan kebijakan “Trump 2.0”. Kebijakan tersebut menyebabkan fenomena economic decoupling, yaitu pemisahan hubungan ekonomi antara dua kekuatan besar dunia.



Gambar 1. Ilustrasi Perang Dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok (Licensed under CC BY)

Secara spesifik, istilah *economic decoupling* digulirkan Trump sebagai bagian dari strategi untuk memisahkan ketergantungan ekonomi AS terhadap Tiongkok yang dipandang sebagai kompetitor utama. Menurut Trump ketergantungan yang tinggi terhadap produk dan teknologi dari Tiongkok berpotensi menyebabkan defisit neraca perdagangan yang besar, praktik

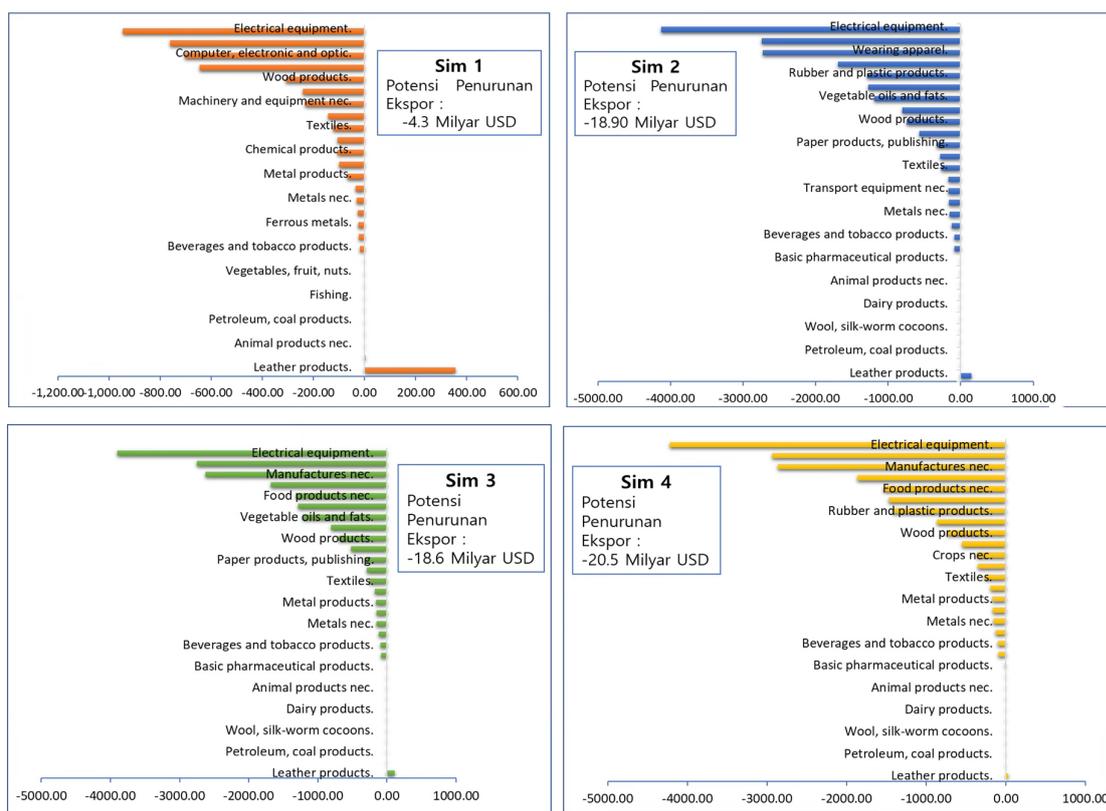
perdagangan tidak adil, serta risiko keamanan nasional. Penerapan *reciprocal tariff* yang baru-baru ini diterapkan oleh Trump merupakan bagian dari kebijakan *decoupling* yang tidak hanya berdampak pada kedua negara, tetapi juga menyebabkan fragmentasi sistem perdagangan global.

Sebagai negara dengan ekonomi kecil dan terbuka (*small open economy*),

Indonesia akan sangat dipengaruhi oleh dinamika ekonomi dan kebijakan global termasuk penerapan *reciprocal tariff*. Kondisi tersebut tentu saja menjadi tantangan serius mengingat perubahan kebijakan ekonomi AS yang lebih agresif, seperti peningkatan tarif impor untuk barang-barang dari Tiongkok, Kanada, dan Meksiko, turut memengaruhi dinamika perekonomian global. Indonesia pun harus bersiap dalam menghadapi risiko-risiko ekonomi yang muncul di tengah ketidakpastian ini.

International Trade Analysis and Policy Studies, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB (ITAPS-FEM-IPB) bersama dengan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) telah melakukan kajian menggunakan pendekatan model *Global Trade Analysis Project* (GTAP) untuk menganalisis dampak kebijakan Trump 2.0 terhadap perekonomian Indonesia. Kajian ini tidak hanya mensimulasikan efek langsung dari kebijakan proteksionis, tetapi juga mempertimbangkan potensi respons balik (*retaliasi*) dari negara terdampak, serta kemungkinan Indonesia bergabung dengan BRICS sebagai langkah strategis untuk meredam tekanan geopolitik.

Secara teknis, simulasi kebijakan yang dilakukan meliputi: (i) Simulasi 1: Dampak Proteksionisme Trump 2.0 dengan Tarif Resiprokal Amerika Serikat terhadap



Gambar 2. Potensi Penurunan Ekspor Indonesia ke Amerika Serikat (Milyar USD) akibat Proteksionisme Trump 2.0

Sumber: Data (Diolah)

RRT 125 % (kecuali elektronik) dan negara lainnya mengikuti *baseline* 10%; (ii) Simulasi 2: Dampak Proteksionisme Trump 2.0 dengan Tarif Resiprokal Amerika Serikat terhadap RRT 125 % dan negara lainnya; (iii) Simulasi 3: Dampak dari Proteksionisme Trump 2.0 dengan Tarif Resiprokal Amerika Serikat dan Retaliasi RRT dan Kanada; dan (iv) Simulasi 4: Dampak Proteksionisme Trump 2.0 dengan Tarif Resiprokal Amerika Serikat disertai dengan Peningkatan *Market Access Indonesia* dalam BRICS.

Pertumbuhan Ekonomi Cenderung Stagnan di Level 5%

Indonesia diperkirakan mengalami stagnasi pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5 persen sebagai respons terhadap meningkatnya ketegangan perdagangan global (Tabel 1). Perlambatan ini terutama dipicu oleh penurunan volume ekspor akibat kebijakan tarif baru yang diterapkan oleh Amerika Serikat. Ketergantungan Indonesia pada pasar global menjadikan ekonomi domestik rentan terhadap perubahan kebijakan eksternal. Di sisi lain, apabila terjadi retaliasi dagang dan negara-negara BRICS meningkatkan permintaan terhadap produk dari Tiongkok, maka Indonesia dapat

Tabel 1. Dampak Proteksionisme Trump 2.0 terhadap Kinerja Makroekonomi Indonesia

Indikator	Sim 1	Sim 2	Sim 3	Sim 4
Pertumbuhan PDB (%)	5.03	5.00	5.04	5.18
Inflasi (%)	-0.14	-0.66	0.07	2.58
Kesejahteraan (Milyar USD)	-1,96	-3,75	-2,96	3,47
Neraca Perdagangan (Milyar USD)	-2.46	-6.28	-8.06	-11.17
Ekspor ke Dunia (%)	-1.78	-4.38	-4.99	-0.21
Impor dari Dunia (%)	-0.30	-1.66	-1.23	7.23
Investasi (%)	0.70	1.81	2.44	4.16

Sumber: Data (Diolah)

mengalami limpahan permintaan yang tidak diimbangi pasokan, sehingga memicu tekanan inflasi domestik yang diproyeksikan mencapai 2,6 persen. Perlambatan pertumbuhan ekonomi tentu saja menjadi tantangan sendiri bagi Indonesia mengingat target pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan oleh pemerintah untuk mencapai Indonesia Emas 2045 adalah sebesar 8%.

Penurunan Kesejahteraan Ekonomi: Hingga USD 3,75 Miliar

Kebijakan tarif resiprokal yang saling diberlakukan oleh negara-negara besar menimbulkan dampak signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi negara mitra dagang, termasuk Indonesia. Simulasi menunjukkan bahwa Indonesia dapat mengalami penurunan kesejahteraan nasional dalam rentang antara USD -1,95 miliar hingga USD -3,75 miliar. Dampak ini terutama dipengaruhi oleh menurunnya konsumsi terhadap produk ekspor Indonesia di pasar Amerika Serikat, yang pada gilirannya berdampak negatif terhadap surplus produsen, khususnya pada komoditas ekspor unggulan.

Penurunan Ekspor Langsung: Hingga -4,99%

Penerapan tarif secara langsung oleh Amerika Serikat terhadap produk Indonesia berpotensi menekan ekspor dalam kisaran -1,78 persen hingga -4,99 persen. Efek ini diperparah oleh dampak tidak langsung yang muncul dari penurunan ekspor Tiongkok ke dunia internasional yang diproyeksikan mencapai -12,38 persen. Produk-produk

Indonesia yang menjadi bagian dari *global value chains* (GVC) bersama Tiongkok, seperti critical minerals, mesin, dan komponen elektronik, turut terkena imbasnya. Gangguan terhadap jaringan produksi global ini mengakibatkan penurunan permintaan internasional terhadap produk intermediate asal Indonesia.

Penurunan Surplus Perdagangan: Hingga USD -11,17 Miliar

Tekanan terhadap ekspor menyebabkan penurunan signifikan pada surplus perdagangan Indonesia. Berdasarkan hasil simulasi GTAP dalam empat skenario berbeda, Indonesia berpotensi mengalami kerugian sebagai berikut: USD -2,46 miliar (Simulasi 1), USD -6,28 miliar (Simulasi 2), USD -8,06 miliar (Simulasi 3), dan USD -11,17 miliar (Simulasi 4). Penurunan surplus ini mencerminkan dampak kumulatif dari hambatan perdagangan bilateral dan melemahnya permintaan dari negara-negara utama tujuan ekspor Indonesia.

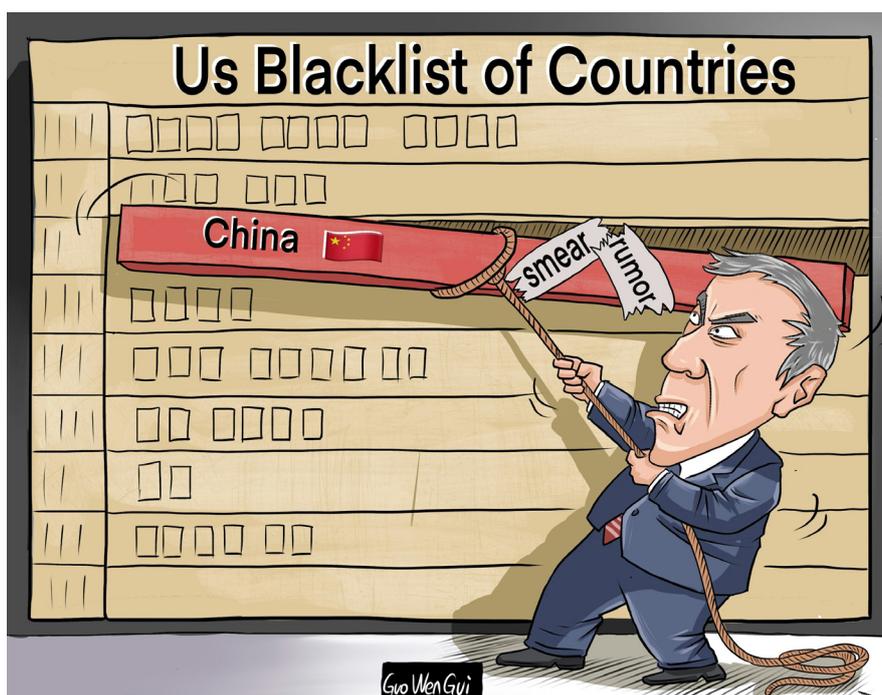
Peluang Relokasi Industri: Posisi Strategis Indonesia di ASEAN

Meski terdapat tekanan terhadap sektor perdagangan, situasi geopolitik ini juga membuka peluang strategis bagi Indonesia. Ketegangan antara AS dan Tiongkok mendorong relokasi basis produksi global dari Tiongkok ke negara lain yang dianggap lebih stabil secara politik dan ekonomi. Dalam hal ini, Indonesia memiliki posisi kompetitif di kawasan ASEAN terutama pada skenario simulasi Trump 2.0 dengan retaliasi karena dikenakan tarif resiprokal yang

lebih ringan dibandingkan negara lain. Filipina menjadi satu-satunya negara di ASEAN yang memiliki posisi sedikit lebih unggul dalam skenario tertentu, tetapi secara umum Indonesia dikonsiderasikan sebagai kandidat utama untuk mendapatkan manfaat peningkatan arus investasi dan relokasi industri.

Dampak Sektoral: Campuran antara Winners dan Losers

Perubahan struktur perdagangan global akibat kebijakan proteksionisme membawa dampak yang bervariasi antar sektor di Indonesia (Gambar 2). Beberapa sektor mengalami peningkatan ekspor, seperti alas kaki dan produk petroleum, yang berhasil mengambil alih ceruk pasar dari negara yang terdampak tarif tinggi. Sebaliknya, sektor-sektor padat karya seperti tekstil dan produk tekstil (TPT), komputer, dan peralatan elektronik mengalami penurunan ekspor signifikan ke pasar Amerika Serikat. Selain itu, sektor pertanian dan perikanan juga mengalami tekanan berat. Produk-produk seperti minyak nabati, hasil pertanian, sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, serta hasil perikanan mengalami penurunan ekspor karena tingginya ketergantungan terhadap pasar AS. Adapun besaran penurunan ekspor bilateral ke AS dalam kisaran 4.3 Milyar USD sampai dengan 20.5 Milyar USD. Meskipun demikian, terdapat potensi substitusi produk Tiongkok yang terkena tarif tinggi oleh AS. Hal ini membuka peluang bagi sektor kulit dan olahan hewani Indonesia untuk memperluas pasar ekspor, dengan asumsi bahwa produk tersebut dapat memenuhi standar dan regulasi yang berlaku (*Non Tariff Measures*) dan preferensi pasar global.



“Bila kaum muda yang telah belajar di sekolah dan mengganggu dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita yang sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali”

-Tan Malaka-

Ekspor dan Euforia: Pelajaran dari *Kessler Syndrome* untuk Indonesia dalam Era RCEP

Oleh **Yulius Pratomo**

Dosen FEB Universitas Kristen Satya Wacana dan Koordinator Fokus Grup Kajian Ekonomi Nasional dan Internasional ISEI Cabang Salatiga

Orbit: Sebuah Permulaan

Pada tahun 1978, seorang ilmuwan *National Aeronautics and Space Administration* (NASA) yang bernama Donald Kessler mengemukakan sebuah teori yang mengkhawatirkan, yakni jika terlalu banyak satelit mengelilingi Bumi dan tidak ada pengelolaan yang memadai, maka tabrakan antar satelit di orbit Bumi dapat terjadi. Fragmen dari tabrakan itu akan menabrak satelit-satelit yang lain sehingga menciptakan efek domino yang bisa mengancam sistem komunikasi global, navigasi, pengamatan cuaca, dan lingkungan. Itulah yang dikenal sebagai *Kessler Syndrome* (Kessler & Cour-Palais, 1978).

Yang menarik, teori tersebut nampaknya tidak hanya relevan untuk sektor antariksa. Dalam konteks ekspor, Indonesia juga berada di "orbit" yang semakin padat, terutama setelah Indonesia bergabung dalam *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP). Perjanjian dagang tersebut membuka peluang besar bagi Indonesia, namun juga menyimpan risiko tersembunyi jika tidak dikelola secara hati-hati.

RCEP: Jalur Peluncuran Strategis untuk Ekspor Indonesia

Sejak mulai berlaku pada 1 Januari 2022, RCEP telah menyatukan 15 negara dengan total kontribusi lebih dari 30% terhadap PDB global. Sebut saja Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, hingga Australia dan Selandia Baru, semuanya adalah negara dengan potensi pasar luar biasa. Bagi Indonesia, ini ibarat membuka jalur peluncuran strategis untuk ekspor, yakni lebih cepat, lebih luas, dan tentu saja lebih menjanjikan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada Januari-Desember 2024, ekspor Indonesia mencapai USD 264,7 miliar. Dari angka tersebut, ekspor nonmigas mencapai USD 248,8 miliar,

naik 2,46% dari tahun sebelumnya. Negara-negara tujuan utama ekspor Indonesia didominasi oleh anggota RCEP, khususnya ASEAN, Tiongkok, Jepang, dan Australia. Negara-negara tersebut menyumbang 51,77% dari total ekspor nonmigas Indonesia pada 2024. Itu adalah angka yang menggembirakan, tetapi sekaligus mengingatkan Indonesia akan satu hal: risiko yang mengintai dibalik angka, yakni jangan sampai euforia menutupi kenyataan.

Navigasi dalam Orbit Padat: RCEP dan Risiko Sistemik ala *Kessler Syndrome*

Di dalam skema besar RCEP, ekspor Indonesia mengorbit di jalur perdagangan yang sangat menjanjikan, tetapi juga sangat padat. Seperti satelit aktif yang meluncur di orbit penuh sampah antariksa, ekspor Indonesia menghadapi tiga jenis tantangan utama, yakni ancaman terhadap ekspor yang sudah mapan, hambatan peluncuran ekspor baru, dan risiko hilangnya jalur perdagangan ekspor secara permanen. Ketidakharmonisan atau divergensi aturan teknis antar negara anggota, dominasi pasar oleh negara besar seperti Tiongkok dan Jepang, serta kebijakan domestik yang tidak sinkron bisa menjadi "puing-puing orbit" yang mengganggu stabilitas dan jalur orbit ekspor Indonesia. Ketika gangguan-gangguan tersebut saling bertumpuk dan tidak dikelola dengan baik, maka efek domino bisa terjadi yang pada akhirnya akan menyulitkan bahkan menghentikan aktivitas ekspor di jalur-jalur tertentu.

Oleh sebab itu, strategi ekspor Indonesia dalam kerangka RCEP perlu mempertimbangkan dinamika orbit perdagangan dimana bukan hanya sekadar mencari ruang untuk meluncur, tetapi juga perlu memastikan bahwa orbit perdagangan tetap bersih, aman, dan berfungsi optimal dalam jangka panjang.

Membangun Sistem Navigasi: Strategi Menuju Ekspor Berkelanjutan

Lantas, bagaimana cara Indonesia agar tidak terjebak dalam *Kessler Syndrome* versi ekspor? Jawabannya ada pada strategi ekspor yang tidak hanya inovatif, tetapi juga harus cerdas dan terukur.

1. Diversifikasi Produk dan Pasar

Indonesia perlu beranjak dari ketergantungan terhadap komoditas mentah, seperti minyak kelapa sawit, batu bara, dan karet. Hilirisasi industri perlu terus menjadi prioritas, seperti yang kini telah diterapkan di sektor nikel. Produk dengan nilai tambah tinggi seperti baterai kendaraan listrik (*Electric Vehicle*, EV) beserta dengan komponen elektronik pendukungnya perlu menjadi pilihan masa depan. Selain itu, meski telah berada di dalam "galaksi" RCEP, ekspor Indonesia juga perlu menjelajah ke pasar di "galaksi tetangga", seperti Afrika, Amerika Latin, dan Eropa.

2. Peningkatan Standar dan Sertifikasi

Saat ini, dunia semakin peduli pada standar. Contohnya, keamanan pangan, keberlanjutan lingkungan, hingga jejak karbon kini menjadi penentu akses pasar. Oleh karena itu, para eksportir Indonesia perlu difasilitasi untuk memahami dan memenuhi standar-standar internasional, termasuk perlunya mereka diperlengkapi dengan program sertifikasi untuk pemanfaatan teknologi digital dalam pelacakan produk yang saat ini belum terlalu familiar di Indonesia, seperti *blockchain*.

3. Penguatan Infrastruktur dan Logistik

Tidak dapat dipungkiri, biaya logistik di Indonesia masih tergolong tinggi. Hal tersebut karena alasan kondisi geografis yang berbentuk kepulauan, biaya bahan bakar yang tinggi, dan infrastruktur

yang belum memadai. Oleh karena itu, modernisasi pelabuhan, integrasi sistem distribusi, hingga adopsi teknologi rantai pasok berbasis AI bisa menjadi faktor penentu. Pemerintah dan sektor swasta perlu bersinergi agar “jalur peluncuran ekspor” benar-benar dapat dinikmati oleh para pelaku usaha mikro, kecil, menengah, besar, dan perusahaan multinasional dari Indonesia.

4. Investasi pada SDM dan Teknologi

SDM adalah fondasi dari keberhasilan misi “antariksa” untuk terus mengorbitkan ekspor Indonesia. Oleh karena itu, sebagai prioritas nasional, SDM Indonesia perlu terus dikembangkan melalui pelatihan vokasional, kolaborasi dengan industri, serta penyusunan kurikulum pendidikan menengah dan tinggi yang adaptif terhadap tren global saat ini, seperti ekonomi hijau dan penguasaan teknologi digitalisasi.

5. Pemantauan Dampak Makro dan Ketahanan Ekonomi

Satu hal yang sering terlupakan dalam euforia ekspor adalah ketidakseimbangan di dalam struktur ekonomi yang saat ini masih dialami Indonesia. Jika ekspor terlalu dominan di sektor industri pengolahan seperti saat ini, maka ekonomi Indonesia bisa menjadi

rentan karena Indonesia terdeteksi berpotensi mengalami deindustrialisasi yang prematur. Oleh karena itu, adalah wajar jika diperlukan adanya sistem pemantauan yang menghubungkan data ekspor dengan sektor ketenagakerjaan, konsumsi rumah tangga, dan ketahanan pangan yang menjadi salah satu pilar kestabilan ekonomi Indonesia.

Belajar dari Satelit: Tertib Orbit, Tertib Ekspor

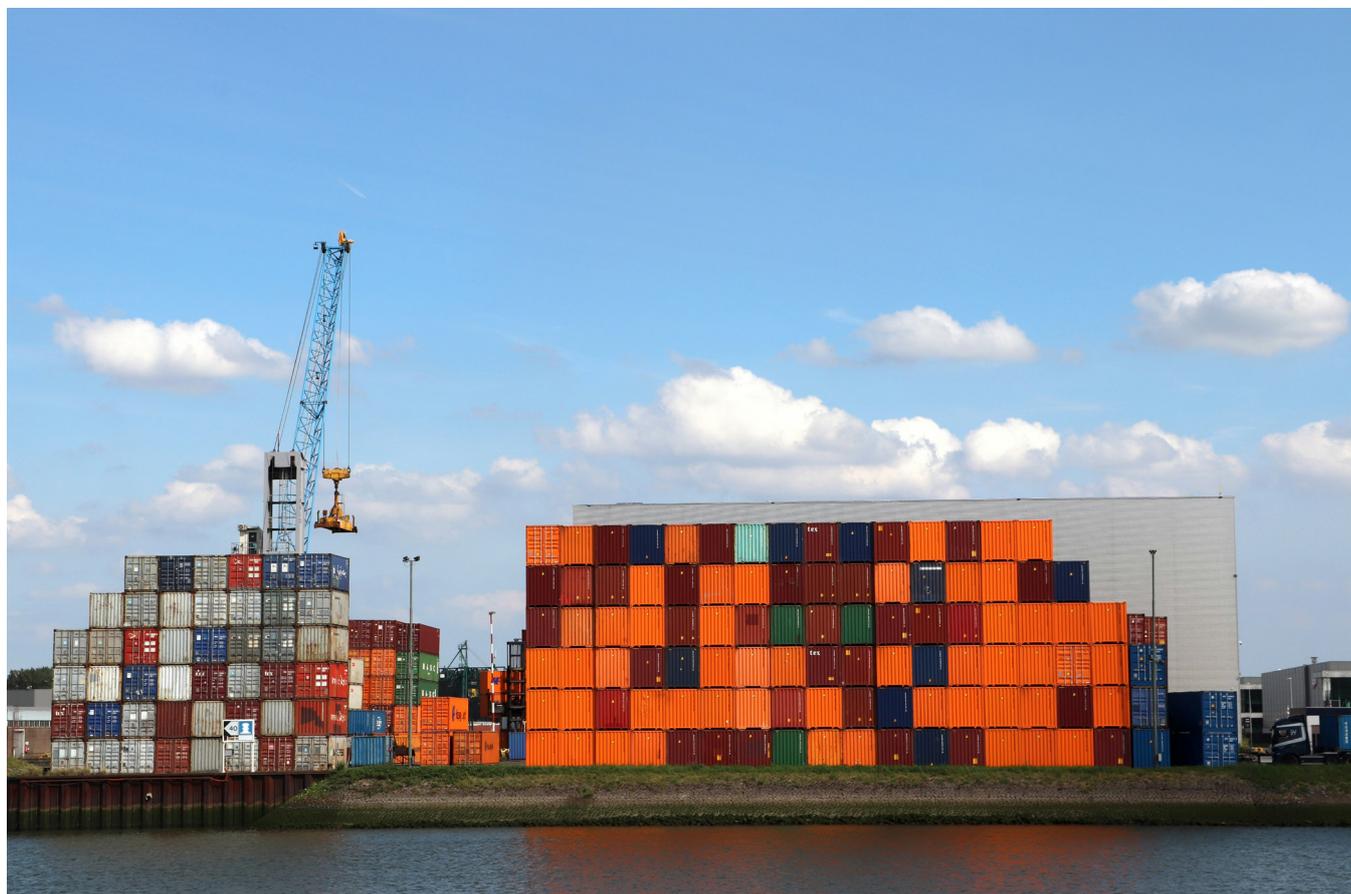
Indonesia dapat belajar banyak dari dunia antariksa. Satelit tidak bisa asal meluncur, namun butuh koordinasi, jalur orbit, bahkan “izin tinggal” di ruang angkasa. Hal yang sama berlaku untuk ekspor, di mana negara ini tidak bisa hanya fokus pada volume ekspor tanpa memperhatikan dampaknya bagi keberlanjutan industri dan keseimbangan ekonomi. Dengan kata lain, strategi peluncuran ekspor harus seperti peluncuran satelit, yakni memiliki misi, jalur yang jelas, dan sistem kendali. Tanpa kesemuanya itu, Indonesia hanya akan memperbanyak objek ekspor di orbit tanpa arah, dan akhirnya menabrak satu sama lain.

Dari Euforia ke Pelajaran Berharga

Dari pembahasan singkat ini, RCEP adalah peluang besar, dan Indonesia memiliki modal untuk menjadi salah

satu pemain utama. Namun, peluang tersebut tidak otomatis menjadi hasil. Dibutuhkan strategi, visi, dan keberanian untuk tidak terbawa arus euforia. Ekspor janganlah hanya menjadi angka dalam laporan statistik, tetapi juga menjadi bukti kebermanfaatannya bagi kesejahteraan rakyat dan masa depan bangsa. Membangun kekuatan ekspor yang berkelanjutan adalah tentang bagaimana Indonesia mengatur lalu lintas perdagangan di tengah “orbit global” yang makin ramai. Tanpa manajemen risiko, strategi adaptif, dan keberanian melakukan reformasi ekspor, Indonesia hanya akan menjadi “puing” dalam lintasan perdagangan global, bukan navigatornya.

Lantas, bagaimana cara Indonesia agar tidak terjebak dalam Kessler Syndrome versi ekspor? Jawabannya ada pada strategi ekspor yang tidak hanya inovatif, tetapi juga harus cerdas dan terukur.



Prospek Ekspor dan Hilirisasi Timah di Tengah Memanasnya Situasi Geopolitik Timur Tengah

Oleh **Dr. Reniati, S.E., M.Si**

Ketua ISEI Cabang Pangkalpinang, Pengurus PP ISEI Bidang III & Koordinator Prodi Magister Manajemen FEB-UBB



Siang itu setelah kegiatan mengikuti kegiatan PPUMI (Pemberdayaan Perempuan UMKM Indonesia) di Jakarta dan PP ISEI di Bogor aku pulang ke Bangka menggunakan pesawat Lion Air yang terlihat terisi penuh. Perjalanan Jakarta-Pangkalpinang, biasanya ditempuh kurang dari 1 jam, tepatnya 55 menit. Tetapi siang itu agak berbeda karena hujan gerimis dari Jakarta sehingga langit mendung, makin menguatkan tangan dan bibir berdzikir memohon keselamatan kepada Sang Pencipta Semesta Alam. Menjelang landing di Pangkalpinang, seperti biasa mataku tertuju pada lubang-lubang bekas galian timah yang bervariasi tapi semua tampak seperti bercak-bercak di daratan yang tak elok dipandang. Akankah lubang-lubang Camui atau sering disebut sebagai kulong ini akan bertambah luas, sementara timah sebagai komoditas unggulan di Babel sampai saat ini belum ada substitusinya. Berarti produk ini sangat dibutuhkan di dunia, dan memiliki prospek yang cerah.

Timah dibutuhkan hampir diberbagai industri manufaktur antara lain, handphone, laptop, TV, Konsol Game, Panel Surya, Peralatan Medis (komponen

elektronik dlm MRI dan Monitor), kaleng makanan/minuman, solder, kabel listrik, peralatan rumah tangga, peluru, drone, robotik, penerbangan dan satelit. Dan yang sedang ngetrend saat ini adalah mobil listrik. ini artinya Timah adalah komoditas strategis di era digital. saat ini, hampir semua perangkat modern dari smartphone hingga mobil listrik bergantung kepada timah dalam bentuk solder dan pelapis. Tetapi sampai saat ini Bangka Belitung sebagai Provinsi penghasil Timah terbesar di Indonesia dan no 2 dunia setelah Tiongkok belum mampu menghasilkan Industri tersebut secara mandiri. Industri pengolahan Timah malah didirikan di Cilegon dan Batam. Sehingga ekonomi Bangka Belitung belum mendapatkan *multiplier effect* sebagai dampak hilirisasi komoditas timah yang merupakan sumberdaya alam yg sangat berharga karena kelangkaannya.

Dalam buku Senja Kala Tata Kelola Timah di Bangka Belitung yang ditulis oleh Derita, Reniati, Iskkandar, Akhmad Elvian dan Faisal (2024) sejak zaman kerajaan, penjajaban (Belanda, Inggris, Belanda dan Jepang), masa kemerdekaan sampai dengan orde baru pengelolaan tambang

timah dimonopoli oleh negara (state-based). Akan tetapi di era reformasi, untuk pertama kalinya di Indonesia, terjadi perubahan paradigma yang sebelumnya dimonopoli oleh negara (state-based-resource management) menjadi lebih terbuka dimana masyarakat diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan tambang timah.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu daerah penghasil timah terbesar di dunia. Dengan cadangan mencapai lebih dari 899 ribu ton (onshore dan offshore), daerah ini menyumbang sekitar 90% dari total produksi timah Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai eksportir timah terbesar di dunia, menguasai sekitar 32% pasar global.

Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global, khususnya di kawasan Timur Tengah, prospek ekspor dan hilirisasi timah Indonesia menjadi semakin penting untuk dikaji. Situasi global ini berdampak pada dinamika harga, permintaan, dan stabilitas rantai pasok timah dunia.

Kondisi Pasar dan Ekspor Timah Bangka Belitung

Tabel 1. Nilai Ekspor Timah (juta US\$) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per April 2025

Negara Tujuan	2024 (juta US\$)		2025 (juta US\$)			Perubahan (%)			Peran Terhadap Total Ekspor Timah Jan-Apr 2025 (%)
	Apr	Jan-Apr	Mar	Apr	Jan-Apr	y-on-y	m-to-m	c-to-c	
Tiongkok	4,89	5,56	41,27	29,00	140,05	493,55	-29,74	2417,51	29,83
Singapura	10,76	25,20	37,67	40,59	96,41	277,16	7,78	282,64	20,54
Korea Selatan	21,98	38,65	22,99	21,16	62,50	-3,73	-7,95	61,73	13,31
India	29,24	43,87	24,84	14,51	43,25	-50,38	-41,58	-1,40	9,21
Jepang	3,60	13,03	14,58	9,88	31,46	174,13	-32,33	141,44	6,70

Sumber: BPS.Prov.Kep.Bangka Belitung, 2025

Data Badan Pusat Statistik Provinsi Babel menunjukkan bahwa nilai ekspor timah pada Januari–April 2025 mencapai 469,43 juta USD, meningkat tajam sebesar 171,20% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Komoditas timah menyumbang 77,87% dari total ekspor provinsi, menunjukkan dominasi signifikan terhadap perekonomian daerah.

Tabel 2. Nilai Ekspor Timah (juta US\$) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Negara Tujuan Per April 2025

Komoditas	2024 (juta US\$)		2025 (juta US\$)			Perubahan (%)			Peran Terhadap Total Ekspor Jan-Apr 2025 (%)
	Apr	Jan-Apr	Mar	Apr	Jan-Apr	y-on-y	m-to-m	c-to-c	
Timah	86,33	173,10	179,72	144,77	469,43	67,70	-19,45	171,20	77,87
Nontimah	34,03	123,79	25,67	31,64	133,43	-7,01	23,26	7,79	22,13

Sumber: BPS.Prov.Kep.Bangka Belitung, 2025

Tiongkok tercatat sebagai negara tujuan ekspor terbesar dengan kontribusi 29,83%, disusul Singapura (20,54%) dan Korea Selatan (13,31%). Pertumbuhan ekspor ke Tiongkok sangat signifikan, yakni 2.417,51% secara tahunan (c-to-c), memperlihatkan tingginya ketergantungan terhadap pasar Asia Timur. Jika dilihat dari lokasinya, maka ekspor Timah Indonesia tidak terdampak kebijakan Amerika Serikat yang terkenal dengan *Reciprocall Tariff*, maupun memanasnya kondisi Timur Tengah saat ini. Hal ini dikarenakan ekspor Timah masih didominasi ke Tiongkok, Singapura dan Korea Selatan. Tetapi untuk jangka Panjang sangat penting untuk dikaji kembali.

Dinamika Pasar Global dan Ketegangan Geopolitik

Secara global, permintaan timah mencapai 383.000 ton per tahun, sedangkan produksinya hanya 300.000 ton, menciptakan defisit 83.000 ton (USGS, 2023). Gangguan produksi dari Myanmar dan Republik Demokratik Kongo (DRC), dua produsen penting, memperburuk defisit ini. Ketegangan geopolitik Timur Tengah, khususnya konflik antara Iran dan Israel, turut memperbesar ketidakpastian global, menaikkan biaya logistik dan membuat investor serta pelaku industri menunda keputusan pembelian jangka panjang.

Meski timah bukan komoditas utama dalam konflik Timur Tengah, dampaknya terhadap sektor logistik dan kepercayaan investor tetap signifikan. Menurut Mohamed El-Erian, konflik tersebut menjadi *"shock negatif"* yang memperparah tekanan inflasi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi global (ft.com; reuters.com).

Hilirisasi Timah: Strategi Nasional Menghadapi Ketidakpastian Global

Menjawab tantangan ketidakpastian dan volatilitas pasar global, hilirisasi timah menjadi kebijakan strategis nasional. Sesuai UU No. 25/2018, ekspor bahan mentah dilarang sebelum melalui proses pengolahan. Pemerintah mendorong pendirian industri pengolahan timah seperti kaleng, solder, dan peleburan lanjutan di dalam negeri,

terutama di Babel.

Hilirisasi dinilai mampu memperkuat ketahanan industri nasional, menciptakan lapangan kerja, dan menambah nilai ekspor. Selain itu, hilirisasi juga memberikan keunggulan kompetitif melalui penerapan sertifikasi *"responsible sourcing"* yang penting bagi pelanggan global seperti Apple dan Samsung.

Namun, sejumlah tantangan masih menghadang. Praktik pertambangan ilegal, tumpang tindih regulasi, hingga korupsi dalam pengelolaan sumber daya menjadi hambatan serius. Kasus pencucian timah ilegal senilai USD 16,8 miliar yang menyeret PT Timah menjadi contoh nyata buruknya tata kelola.

Beberapa langkah strategis diperlukan untuk mengoptimalkan potensi ekspor dan hilirisasi timah:

Penguatan Regulasi dan Tata Kelola: Harmonisasi peraturan pusat-daerah dan penindakan terhadap pertambangan ilegal sangat mendesak dilakukan.

Diversifikasi Pasar Ekspor: Mengurangi ketergantungan terhadap pasar tertentu dengan memperluas jangkauan ekspor ke Eropa, Amerika Latin, dan Afrika.

Pembangunan Industri Hilir di Babel: Memberikan insentif investasi untuk industri pengolahan dan mendukung pembangunan infrastruktur energi, logistik, dan pelabuhan.

Keberlanjutan Sosial dan Lingkungan: Reklamasi lahan bekas tambang, konservasi mangrove, dan pelibatan masyarakat lokal dalam program ekonomi hijau sangat penting untuk memastikan dampak positif hilirisasi jangka panjang.

Penutup

Di tengah memanasnya situasi geopolitik Timur Tengah dan meningkatnya defisit pasokan timah global, Indonesia—khususnya Bangka Belitung memiliki peluang besar untuk memperkuat posisinya sebagai pemain strategis di pasar global. Namun, keberhasilan ini sangat ditentukan oleh keberhasilan implementasi hilirisasi yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan. Dengan strategi hilirisasi yang matang, penguatan regulasi, dan komitmen keberlanjutan, Indonesia bukan hanya dapat menjaga stabilitas ekspornya, tetapi juga menempatkan timah sebagai simbol kemandirian industri nasional.

Vulnerability Ekspor dan Impor Daerah Istimewa Yogyakarta

Oleh **Dr. Rudy Badrudin**

Pengurus Pusat ISEI Bidang III (FG Infrastruktur & Pembangunan Kewilayahan)

Vulnerability ekspor dan impor Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah kelemahan dalam sistem, perangkat lunak, jaringan, atau proses yang terjadi karena penyebab internal dan eksternal dalam perdagangan ekspor dan impor DIY. Ekspor dan impor dalam suatu wilayah berperan penting dalam kestabilan perekonomian wilayah tersebut. Sebagai wilayah ekonomi terbuka untuk lalu lintas barang dan jasa, pelaku ekonomi di DIY tidak dapat membatasi dirinya pada pasar dalam wilayah DIY saja. Selama DIY tidak menutup seluruh batas-batas wilayahnya terhadap masuknya barang dan jasa dari luar daerah dan luar negeri, selama itu pula wawasan pemasaran dari pelaku ekonomi di DIY harus berorientasi unggul. Oleh karena itu, untuk mempertahankan diri, pelaku ekonomi di DIY harus mampu menghasilkan barang dan jasa yang harganya lebih murah atau efisien, sehingga mampu memasuki pasar wilayah lain dan global.

Dalam era perdagangan global, arus keluar masuk barang dan jasa yang meliputi antarnegara maupun antarwilayah dalam negeri adalah suatu keniscayaan, apalagi dalam era perdagangan global yang berbasis teknologi informasi (Watson et al., 2018). Aktivitas keluar masuknya barang dan jasa terjadi karena perbedaan variasi barang dan jasa yang diproduksi, disparitas harga, biaya produksi, kurs nilai tukar menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor dan impor. Wilayah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri akan mendatangkan barang dan jasa dari wilayah atau bahkan negara lain. Pada sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi kebutuhan domestik terdorong untuk memperluas pasar ke luar wilayah atau bahkan ke luar negeri.

Vulnerability ekspor dan impor DIY sangat dipengaruhi oleh ketergantungan yang tinggi pada komoditas tertentu seperti produk kerajinan (batik, perak, furniture), makanan olahan dan hasil pertanian, produk kulit dan tekstil yang rentan jika

permintaan global turun atau muncul pesaing murah (misalnya dari China atau Vietnam). Fluktuasi selera pasar dalam negeri dan global memengaruhi penyerapan produk kreatif/kerajinan. Di samping itu, DIY sebagai daerah yang bukan basis industri berat; maka industri kecilnya banyak mengimpor bahan baku seperti mesin produksi dan bahan kimia makanan/obat yang kerentanannya tinggi terhadap fluktuasi kurs Rupiah, gangguan logistik global, dan kebijakan dagang negara eksportir. Jika harga bahan baku naik, maka produk akhir menjadi kurang kompetitif sehingga kalah bersaing.

Lokasi geografis dan akses pelabuhan juga menjadi unsur dalam *vulnerability* ekspor dan impor DIY karena DIY tidak mempunyai pelabuhan laut besar. Logistik ekspor dan impor sangat tergantung dari pelabuhan di Tanjung Emas (Semarang) dan Tanjung Perak (Surabaya). Ekspor barang ke luar negeri sebagian besar dikirim melalui 4 (empat) pelabuhan muat, yang berada di Provinsi Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Timur, dan DIY sendiri. Proporsi terbesar ekspor dari DIY melalui Provinsi Jawa Tengah dengan proporsi 70,80 persen, diikuti DKI Jakarta (27,59 persen), Jawa Timur (0,90 persen), dan sisanya langsung dari DIY (0,57persen), dan provinsi lain (0,14 persen). Hal ini sangat rentan karena akan menambah biaya logistik sehingga membuat DIY kalah bersaing dalam ekspor dibanding wilayah industri seperti Jawa Barat atau Banten.

Sebagian besar pelaku usaha di DIY adalah UMKM dengan akses yang terbatas terhadap fasilitas pembiayaan ekspor, pengetahuan teknis ekspor-impor, regulasi dan sertifikasi internasional sehingga kerentanannya menyebabkan sulit menjangkau pasar global dan terlambat merespons perubahan regulasi atau permintaan luar negeri. Gejolak eksternal global seperti perang dagang (misalnya AS-China), ketegangan geopolitik (misalnya konflik Rusia-Ukraina, Laut Cina Selatan, dan

sekarang Timur Tengah khususnya Iran-Israel) dapat berdampak langsung ke ekspor kerajinan dan pariwisata yang terkait ekonomi jasa DIY.

Data nilai ekspor barang pada triwulan II-2024 mencapai nilai 122,22 US\$, dengan negara utama tujuan ekspor adalah Amerika Serikat (43,03 persen). Selama triwulan II-2024, nilai ekspor terbesar dari DIY adalah ekspor komoditas industri pengolahan, mencapai 121,73 US\$, atau lebih dari 99 persen dari total ekspor barang ke luar negeri, sisanya merupakan ekspor sektor pertanian. Apabila dilihat dari sisi impor luar negeri, selama kurun waktu triwulan II-2024 mengalami peningkatan dengan total nilai impor sebesar 41,53 juta US\$. Negara yang menjadi asal impor utama DIY adalah China (lebih dari 40 persen) yang sebagian besar berupa bahan baku/penolong, dengan persentase sebesar 89,04 persen. Sisanya merupakan impor barang konsumsi dan barang modal. Besarnya impor bahan baku/penolong ini digunakan untuk proses produksi industri. Oleh karena itu, kondisi geopolitik global sangat membuat rentan ekspor dan impor DIY.

Untuk mengatasi *Vulnerability* ekspor dan impor DIY, maka perlu diversifikasi pasar ekspor dan impor dan komoditas agar tidak tergantung hanya pada 1 negara tujuan dan negara asal serta tergantung pada satu komoditas tertentu. Di samping itu juga perlu peningkatan literasi perdagangan internasional untuk UMKM khususnya UMKM ekspor, penguatan logistik terintegrasi melalui kerjasama dengan provinsi tetangga sebagai daerah penyangga, digitalisasi rantai pasok dan promosi dagang internasional, serta perluasan skema pembiayaan dan asuransi ekspor dan impor.

Opini

Aroma yang Membelah Samudra: Sejarah Panjang Rempah Nusantara

Oleh **Faiz Nursyahbari**
Mahasiswa Ilmu Ekonomi FEM IPB

Dunia modern hari ini pernah dibangun oleh banyak hal, teknologi yang menciptakan kemajuan, diplomasi yang merangkai kesepakatan, hingga konflik yang menciptakan batas, sejarah, hingga berbagai macam peraturan. Tapi jauh sebelum semua itu mendominasi peradaban, dunia pernah bergerak karena satu hal sederhana, yaitu rempah-rempah.

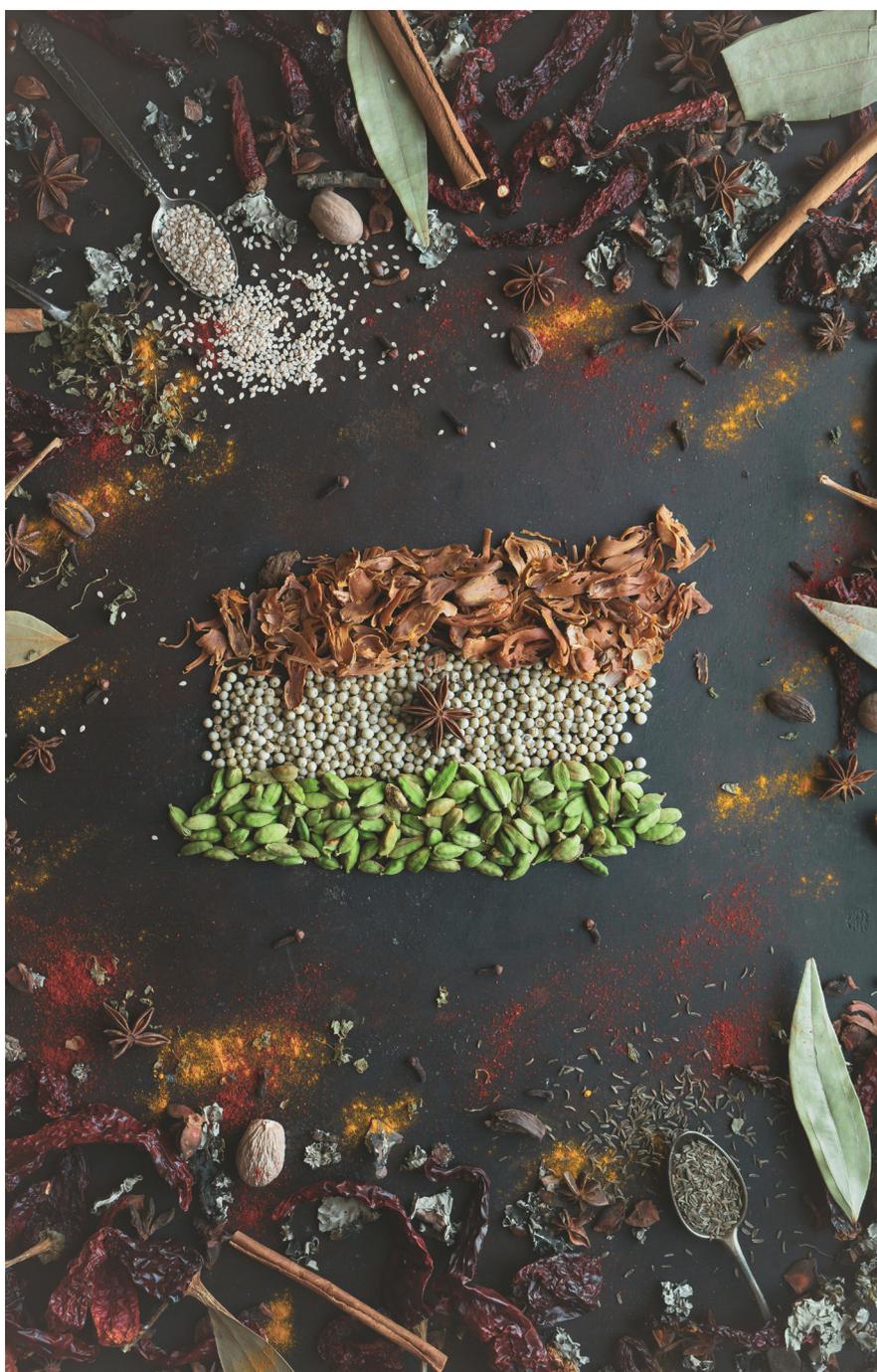
Dalam sejarah panjang umat manusia, rempah bukan sekadar pelengkap rasa. Rempah pernah menjadi salah satu alasan kuat manusia berlayar jauh melampaui cakrawala. Ketika kompas baru dipahami, dan bintang-bintang jadi penunjuk arah, yang dicari adalah sekumpulan komoditas bernama kapulaga dan pala.

Rempah-rempah adalah komoditas yang mampu menggerakkan kapal perang, menyatukan kerajaan, dan membelah samudra. Nilainya tidak hanya dilihat dari rasa, tapi dari kekuatan: menyembuhkan luka, mengawetkan daging, hingga menghangatkan musim dingin di daratan Eropa.

Sejarah yang Bukan Sekadar Cerita Lama

Ketika bangsa-bangsa Eropa di abad ke-15 memutuskan berlayar ke timur, yang mereka cari bukan emas atau batu mulia, tapi cengkeh, lada, kapulaga, dan pala. Rempah-rempah dianggap lebih berharga dari logam mulia, karena bisa mengawetkan makanan, menyembuhkan penyakit, bahkan jadi simbol status kebangsawanan.

Di peta pelayaran kuno itu, saat dunia tanpa Google Maps dan GPS, seluruh dunia tahu satu titik kecil di peta yang bernama **Moluccas** (Maluku). Bukan karena letaknya yang strategis, bukan karena kekayaan tambang, melainkan karena aroma rempahnya.



Di balik aromanya yang kuat, terkandung kekuatan geopolitik yang dulu mengubah peta dunia. Di Maluku, khususnya Pulau Banda, pohon pala tumbuh liar, sementara bangsa-bangsa besar dari belahan bumi barat justru saling berebut untuk mendapatkannya. Saking berharganya, pala bahkan pernah dipakai sebagai alat barter dalam perjanjian internasional, yaitu Pulau Run (penghasil pala) ditukar dengan Pulau Manhattan dalam Perjanjian Breda tahun 1667.

Kita sering merayakan sejarah panjang Indonesia sebagai nostalgia. Salah satunya bahwa rempah Indonesia pernah lebih mahal dari emas. Bahwa Pulau Run di Maluku pernah ditukar Belanda dengan Manhattan kepada Inggris. Tapi sejarah bukan sekadar untuk dikenang—sejarah adalah kompas. Pala dulu membawa bangsa-bangsa dunia datang ke Nusantara. Hari ini, rempah itu masih kita miliki. Tapi bagaimana nasibnya?

Data Berbicara

Kita semua menyadari bahwa kita masih punya keunggulan nyata, Indonesia saat ini masih sebagai salah satu penghasil pala terbesar di dunia. Dilansir dari Trademap, pala yang dikategorikan sebagai HS Code 0908 bersama fuli (bunga pala) dan kapulaga, pada tahun 2022 Indonesia pernah mengekspor 39.095 ton (20,6 persen dari permintaan global), Tapi keunggulan itu belum diolah jadi pengaruh. Volume ekspor kita besar, tapi nilai tambahnya belum maksimal. Nilai ekspornya bahkan tertinggal dari negara seperti Guatemala yang ironisnya, tidak punya sejarah rempah seperti kita.

Tidak berhenti disitu, dalam dua dekade terakhir produktivitas komoditas ini justru terus mengalami penurunan. Pada 2004, produktivitas pala, fuli, dan kapulaga Indonesia tercatat sekitar **439 kg per hektar**. Dua puluh tahun kemudian, angka itu turun tajam menjadi hanya **161 kg per hektar**. Di sisi lain, Guatemala—negara yang bukan penghasil tradisional—justru mencatatkan peningkatan produktivitas yang konsisten dari tahun ke tahun.

Angka-angka ini menyampaikan pesan yang patut dicermati: Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menjaga dan meningkatkan produktivitas pala. Komoditas ini belum sepenuhnya memperoleh perhatian strategis yang sepadan dengan potensinya. Bukan karena ketiadaan sumber daya, melainkan mungkin karena masih perlunya kesadaran kolektif akan peran penting pala dalam ekonomi berbasis kekuatan lokal. Di tengah kekayaan hayati dan sejarah panjang rempah Nusantara, pala layak diposisikan lebih strategis—bukan hanya sebagai produk ekspor, tapi sebagai bagian dari arah pembangunan ekonomi yang bernilai tambah dan berkelanjutan.

Di Era Baru: Dari Komoditas ke Identitas

Tren dunia sedang berubah. Konsumen global kini mencari produk yang alami, berkelanjutan, dan memiliki cerita budaya. Di titik inilah pala menemukan relevansi barunya. Sebagai rempah aromatik tropis, pala, fuli, dan kapulaga kaya akan senyawa bioaktif seperti

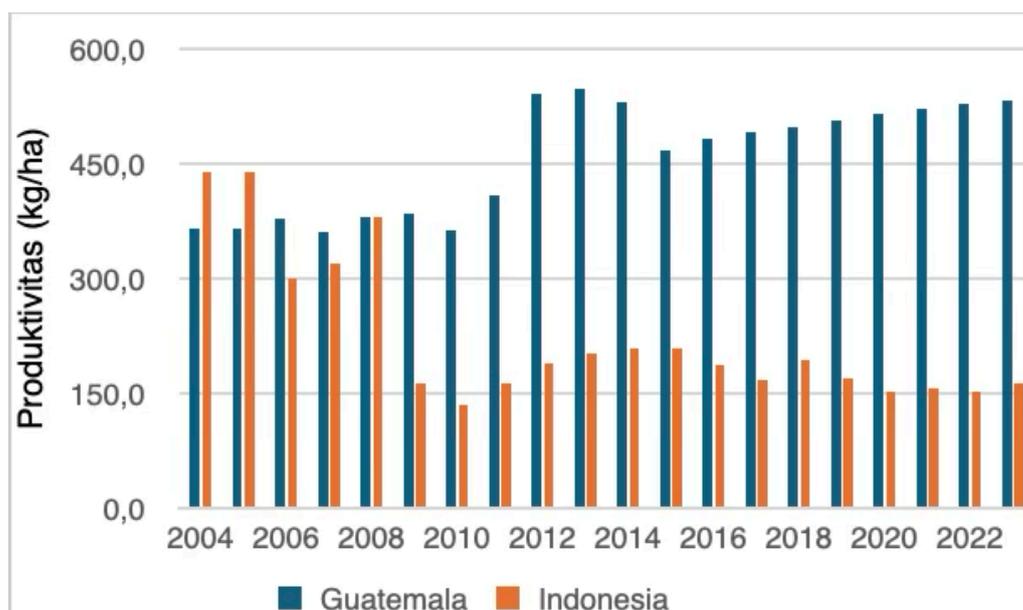
myristicin, eugenol, hingga antioksidan alami yang digunakan dalam industri kesehatan, makanan organik, hingga kosmetik. Potensi ini tak hanya membuka peluang pasar baru, tapi juga peluang transformasi identitas.

Bayangkan jika Indonesia bukan hanya pengeksport mentah, tapi juga pemimpin pasar minyak atsiri dunia. Bayangkan bila dari Ternate, Tidore, hingga Fakfak tumbuh usaha-usaha kecil berbasis rempah yang mendunia. Startup rempah, *wellness brand* lokal, hingga produk farmasi yang mencantumkan label "*Spices of Indonesia*".

Sebuah Ajakan, Bukan Penyesalan

Jika dulu rempah adalah alasan bangsa-bangsa datang menjajah, kini ia bisa menjadi alasan dunia datang untuk bekerja sama. Rempah-rempah, termasuk pala dan kapulaga, bukan sekadar warisan masa lalu. Ia adalah peluang masa depan. Indonesia berdiri di persimpangan Sejarah melanjutkan pola ekspor bahan mentah yang ditentukan harganya oleh negara lain, atau membangun ulang identitas sebagai penggerak utama ekonomi rempah dunia.

Pilihan itu ada di tangan kita. Dulu, dunia datang ke Nusantara karena kita punya sesuatu yang mereka butuhkan. Hari ini, kita punya kesempatan untuk memilih: menjadi pasar yang pasif, atau menjadi pemain utama yang menentukan arah. Masa kejayaan rempah pernah terjadi. Tapi tak ada alasan ia tak bisa terjadi lagi.



Produktivitas pala, fuli, dan kapulaga Indonesia dan Guatemala pada tahun 2004 – 2023

Sumber: FAO, 2024

Opini

Menjawab Tantangan Global: Strategi Penguatan Ekspor Jawa Timur

Oleh **Dr. Ciplis Gema Qori'ah**

Anggota FG Inklusi Ekonomi Keuangan PP ISEI/Wakil Sekretaris I ISEI Jember

Ekspor merupakan bagian penting dari perdagangan internasional yang memberikan keuntungan bagi sebuah negara dan pelaku bisnis. Dengan harapan ekspor mampu mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Manfaat dari ekspor ini dapat meningkatkan pendapatan nasional, pembentuk devisa negara, mendorong inovasi dan pengembangan produk, perluasan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, peningkatan kerjasama internasional dan membuka akses ke pasar global. Seperti yang dijelaskan dalam teori keunggulan komparatif Heckscher-Ohlin (1933), bahwa dasar terjadinya perdagangan internasional terletak pada perbedaan ketersediaan faktor produksi (*factor endowment*), sehingga suatu negara cenderung berspesialisasi dalam memproduksi barang tersebut dan meningkatkan efisiensinya secara keseluruhan.

Ketidakpastian Global dan Ketegangan Geopolitik

Namun kondisi pasar global saat ini diwarnai oleh ketidakpastian dan volatilitas yang meningkat, yang didorong oleh berbagai faktor termasuk ketegangan geopolitik, dinamika negosiasi tarif dan keputusan menahan suku bunga oleh Bank Sentral Amerika Serikat The Fed. Sehingga menyebabkan kekhawatiran tentang perlambatan ekonomi global terus mengemuka selain kondisi ekonomi internal masing-masing negara yang terdistrahekan oleh problem *budget balance*, utang, pengangguran dan industri manufaktur yang kian melemah. Konflik Timur Tengah antara Israel dan Iran memicu kekhawatiran terhadap pasokan energi dan volatilitas pasar global dimana harga minyak Brent mendekati USD 80–87/barel. Tarif AS masih tinggi dengan tekanan eskalasi dagang ke Kanada, Meksiko dan China. Kondisi ini tentu akan memperlemah kepercayaan bisnis dan menekan perdagangan global. Organisasi

untuk kerjasama dan pembangunan ekonomi (*Organisation for Economic and Co-operation and Development* OECD) dan Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan global sekitar 2,9 persen untuk tahun 2025 hingga 2026, menurun dari 3,3 persen di tahun 2024. Bank Dunia bahkan menurunkan proyeksi ke level lebih rendah yaitu 2,4 persen untuk tahun 2025. Kondisi ini lebih disebabkan oleh terjadinya tekanan dari tarif perdagangan tinggi, pelambatan investasi dan hambatan rantai pasok.

Implikasi dari ketidakpastian global tentu akan berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia yaitu terjadinya perlambatan ekspor baik secara langsung ke AS maupun negara mitra dagang lainnya, potensi relokasi arus barang dari AS ke Indonesia oleh negara mitra dagang lainnya dengan tarif lebih tinggi dari Indonesia, potensi peningkatan ekspor ke AS sebagai *substitute* dari komoditas ekspor negara dengan tarif lebih tinggi dari Indonesia, potensi peningkatan gejolak harga komoditas khususnya energi yang dapat mendorong *imported inflation* serta peningkatan ekspor emas ke negara utama seperti Swiss, Jepang dan Hongkong seiring dengan peningkatan permintaan *safe have asset*.

Nilai dan Negara Tujuan Ekspor Indonesia

Data BPS mencatat bahwa nilai total ekspor nasional pada tahun 2023 sebesar USD 258 miliar dengan volume produk sawit dan turunannya sebesar 27,5 juta ton dan batubara thermal sebesar 505 juta ton dengan kategori *harmonised system* (HS) utama tahun 2023 adalah kelompok mesin, batubara, minyak sawit, kendaraan bermotor dan logam. Sedangkan ada tahun 2024 nilai ekspor mengalami kenaikan 2,29 persen dengan nilai sebesar USD 264,7 miliar dengan kontribusi terbesar masih bersumber dari sektor industri pengolahan dan pertambangan. Pada kuartal I 2025,

ekspor non migas melaju kuat hingga 16 persen, sedangkan kontribusi sektor pertambangan melemah dengan total penerimaan bulanan sebesar USD 21-22 miliar. Komoditas ekspor utama tahun 2025 masih didominasi oleh CPO dan turunannya (non migas), besi/baja, mesin mekanik, logam mulia dan batubara.

Negara tujuan utama ekspor Indonesia yaitu negara Tiongkok dengan kontribusi keseluruhan dari Januari hingga November 2024, rata-rata per bulan USD 6,24 miliar dengan komoditas unggulan bahan bakar mineral (HS 27) sebesar USD 17,6 miliar dari total HS 27 sebesar USD 39,65 miliar. Selain itu lemak dan minyak hewani/nabati (HS 15, termasuk CPO) mencapai USD 6,08 miliar dari total USD 26,82 miliar serta besi dan baja (HS 72) sebesar USD 18,3 miliar dari total USD 25,8 miliar. Sedangkan negara tujuan kedua dari ekspor Indonesia adalah Amerika Serikat, dengan pangsa pasar non migas 11,2 persen di tahun 2024, nilai ekspor non migas USD 2,34 miliar per bulan. Kemudian komoditas unggulan ekspor ke AS adalah mesin dan peralatan elektrik (HS 85) dengan total ekspor sebesar USD 15,05 miliar. Selain mesin, kendaraan dan bagiannya (HS 87) dengan total nilai ekspor sebesar USD 11,15 miliar. Negara ketiga tujuan utama ekspor Indonesia adalah Jepang, dengan total nilai ekspor sebesar USD 16,8 miliar di tahun 2024 dengan komoditas utama bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewani/nabati serta besi dan baja. Secara keseluruhan, kinerja ekspor nasional tahun 2024 tumbuh moderat sebesar 2,3 persen atau mengalami surplus USD 31 miliar, namun besaran meruakan surplus terendah dalam 4 tahun terakhir. Sedangkan kuartal I tahun 2025, kinerja ekspor nasional menunjukkan tumbuh positif antara 3 hingga 6 persen dengan nilai sebesar USD 11 miliar yang didukung oleh ekspor manufaktur, agrikultur, CPO dan nikel. Nilai ekspor nasional diperkirakan terus tumbuh positif sebesar USD 277 miliar hingga kuartal

IV tahun dan 2025 dan USD 301 miliar di tahun 2026. Estimasi ini mendukung strategi peningkatan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen pada tahun 2029, terutama penyerapan produk UMKM naik kelas dari USD 19,3 miliar di tahun 2025 akan meningkat menjadi USD 22 miliar di tahun 2026. Realisasi nilai dan ekspor ini sangat bergantung pada implementasi penerapan kebijakan *free trade area* (FTA), kondisi pasar global, serta kebijakan strategis pemerintah dan sektor swasta dalam menggenjot ekspor, terutama dari sektor-sektor unggulan seperti kelapa sawit, tekstil, sepatu dan komponen elektro.

Kondisi Makroekonomi dan Potensi Ekspor Jawa Timur

Sektor industri pengolahan mendominasi ekspor Jawa Timur sepanjang tahun 2024, dengan kontribusi signifikan dari komoditas seperti perhiasan/permata, tembaga, dan kayu serta barang dari kayu. Negara tujuan ekspor utama termasuk Jepang, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Pada November 2024, Jawa Timur mengalami defisit neraca perdagangan sebesar USD 224,70 juta, disebabkan oleh defisit sektor migas yang mencapai USD 418,13 juta, meskipun sektor nonmigas mencatat surplus sebesar USD 193,43 juta. Meskipun terdapat fluktuasi bulanan, tren tahunan menunjukkan potensi pertumbuhan ekspor yang positif. Dengan strategi diversifikasi pasar dan peningkatan daya saing produk, Jawa Timur berpotensi untuk memperkuat posisinya dalam perdagangan internasional pada tahun 2025. Komoditas ekspor utama Jawa Timur, yaitu perhiasan/permata, tembaga dan produk turunannya dimana tembaga banyak digunakan industri elektronik dan manufaktur, kayu dan produk turunannya seperti furniture, dan bahan bangunan juga berkontribusi besar, serta produk industri pengolahan lain, termasuk mesin, alat transportasi, dan produk kimia.

Pada kuartal I tahun 2025, kinerja ekspor Jawa Timur menunjukkan tren positif. Total nilai ekspor Jawa Timur mulai Januari hingga April 2025 meningkat 2,27 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024 yaitu sebesar USD 8,13 miliar. Sedangkan ekspor non migas sebesar USD 8,10 miliar atau meningkat 3,65 persen dibandingkan tahun 2024 sebesar USD 7,81 miliar dan ekspor migas mengalami penurunan signifikan sebesar USD 211,24 juta atau turun sebesar 32,22 persen dibandingkan tahun 2024 sebesar USD 311, 66 juta. Sektor industri pengolahan masih menjadi kontributor utama ekspor non migas Jawa Timur dengan total nilai USD 7,65 miliar atau 92,02

persen dari total ekspor non migas atau mengalami kenaikan sebesar 2,11 persen dibandingkan dengan tahun 2024. Selain industri pengolahan, sektor pertanian juga sebagai penopang kedua dari ekspor Jawa Timur yang meningkat sebesar 46,57 persen atau sebesar USD 435, 98 juta yang didorong oleh produk ikan, krustasea, moluska dan kakao beserta produk turunannya. Secara keseluruhan hingga kuartal I tahun 2025 ekspor Jawa Timur menunjukkan kinerja yang positif, terutama didorong oleh sektor non migas seperti industri pengolahan dan pertanian. Walaupun terdapat tren penurunan nilai ekspor sektor migas, namun sektor non migas memberikan sinyal optimisme pada perekonomian daerah.

Tantangan dan Strategi Kebijakan

Di tengah meningkatnya nilai ekspor non migas, Jawa timur masih menghadapi beberapa tantangan diantaranya fluktuasi harga komoditas internasional, dimana harga komoditas seperti minyak, kakao, dan produk perikanan sering bergejolak yang memengaruhi pendapatan ekspor secara keseluruhan. Selain itu juga kendala logistik dan infrastruktur, meskipun wilayah Jawa Timur memiliki pelabuhan besar seperti Tanjung Perak, namun masalah kemacetan, biaya logistik tinggi, dan keterbatasan infrastruktur pendukung masih menjadi kendala dalam proses pengiriman barang ekspor. Termasuk perubahan regulasi dan kebijakan internasional serta kebijakan tarif, kuota impor, atau proteksionisme dari negara tujuan ekspor bisa menghambat akses pasar dan mengurangi daya saing produk Jawa Timur di pasar global. Demikian halnya dengan faktor standar kualitas dan sertifikasi produk, dimana produk ekspor harus memenuhi standar internasional yang ketat, terutama untuk komoditas pertanian dan perikanan. Proses sertifikasi yang rumit dan biaya yang kurang terjangkau, sering menjadi penghambat bagi pelaku usaha terutama usaha kecil dan menengah (UMKM) yang didalamnya juga terkait dengan factor persaingan global yang ketat, dimana komoditas ekspor Jawa Timur bersaing ketat dengan produk dari banyak negara yang juga memproduksi komoditas serupa. Faktor biaya produksi, inovasi produk, dan branding menjadi sangat penting untuk memenangkan persaingan ini. Selanjutnya tantangan yang lain adalah faktor ketergantungan pada negara tujuan ekspor utama, seperti Tiongkok dan AS, sehingga jika terjadi risiko gangguan akan berdampak terhadap perubahan permintaan produk tersebut. Isu lingkungan dan keberlanjutan (*Sustainable Development Goals*) juga menjadi tantangan komoditas ekspor Jawa Timur dimana tekanan



untuk memenuhi standar lingkungan internasional dan praktik produksi berkelanjutan makin meningkat serta keterbatasan teknologi dan inovasi sehingga kurang mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk ekspor.

Oleh karena tantangan yang dihadapi sangat kompleks, maka diperlukan kerjasama yang holistik dari semua *stakeholder* termasuk peran perguruan tinggi dan lembaga riset. Langkah konkret yang dapat dilakukan adalah sistem kelembagaan yang menyangkut payung hukum hilirisasi produk, izin usaha dan insentif pajak, diversifikasi produk dan pasar dengan melakukan riset pasar dan konsumen global, pengembangan produk baru dengan nilai tambah yang tinggi, pelatihan dan pendampingan pelaku usaha, ekspansi pasar atau negara tujuan baru serta promosi produk diversifikasi melalui ekshibisi internasional. Selain itu diperlukan peningkatan infrastruktur dan logistik yang memadai, peningkatan kualitas dan sertifikasi produk, penguatan branding dan promosi, pemanfaatan teknologi dan inovasi, pendampingan dan fasilitasi dari pemerintah, pengelolaan risiko dan informasi pasar sehingga mampu menciptakan komoditas ekspor yang mampu bersaing baik dari sisi harga dan kualitas serta memenuhi standar lingkungan.

Opini

Strategi Ketahanan Indonesia di Tengah Perang Tarif AS

Oleh **Maxensius Tri Sambodo**

Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) & Pengurus Pusat ISEI Bidang IV

Mercantilists advocated exporting goods in order to get gold, believing that this would make their economies richer and their nations more politically powerful. Today, we might chuckle at these foolish policies: having more gold sitting in a vault doesn't provide higher standards of living. Yet similar misperceptions are prevalent today—especially among those who argue that exports must exceed imports, and pursue misguided policies aimed at achieving this (Joseph E. Stiglitz, 25–26).

Kegaduhan Kebijakan Tarif Amerika Serikat

Di awal April 2025 Presiden Amerika Serikat (AS) Donald J. Trump mengumumkan penerapan tarif balasan atau "reciprocal tariff" sebesar 10% terhadap banyak negara, dan tarif khusus dikenakan terhadap 25 negara yang disebut sebagai pelanggar terburuk (Indonesia masuk di daftar tersebut). Kebijakan ini sontak menuai keberatan dari banyak negara, bahkan dalam salah satu pemberitaan CNN Indonesia, Pemerintah Tiongkok mengatakan kebijakan tarif AS sebagai taktik ekonomi kasar dan menindas.

gejolak yang terjadi di pasar saham, obligasi, dan uang; kebijakan ini ditunda selama 90 hari untuk membuka ruang negosiasi, dan tarif akhir akan ditetapkan di tanggal 8 Juli 2025.

Kebijakan Presiden Trump telah berseberangan dengan filosofi perdagangan bebas yang diyakini menjadi salah satu jalan untuk mencapai kesejahteraan (Adam Smith, *Wealth of Nations*, 1776). Kebijakan ekonomi Trump juga banyak menuai kritik dari Joseph E. Stiglitz, ekonom peraih Nobel di tahun 2001. Dalam bukunya yang berjudul *'People, Power, and Profits: Progressive*

Table 1 Tarif rata-rata sederhana yang diterapkan Indonesia dan Amerika Serikat

Indonesia	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Semua produk (%)	5,86	6,25	6,71	6,29	6,02	5,82
Produk manufaktur (%)	5,75	6,11	6,19	6,32	6,05	5,78
Produk primer (%)	6,82	7,39	10,66	6,2	5,82	6,21
Rata-rata	6,1	6,6	7,9	6,3	6,0	5,9
Amerika Serikat	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Semua produk (%)	3,36	3,25	8,7	2,87	2,79	2,72
Produk manufaktur (%)	2,77	2,77	3,11	2,92	2,84	2,78
Produk primer (%)	6,64	5,96	39,52	2,72	2,56	2,48
Rata-rata	4,3	4,0	17,1	2,8	2,7	2,7

Sumber: World Development Indicators (Last Updated: 06/05/2025).

Table 1 memperlihatkan, rata-rata tarif di AS dalam tiga tahun ini tidak lebih dari 3%, sementara itu rata-rata tarif Indonesia lebih tinggi di dibandingkan dengan AS dan perbedaan besaran rata-rata antara tahun 2020 dan 2022 sekitar 3,3%. Jika dicermati, dalam periode pemerintahan pertama Donald Trump (20 Januari 2017 – 20 Januari 2021), tarif rata-rata memperlihatkan pola yang menurun. Penerapan tarif balasan sebesar 32% terhadap produk Indonesia oleh AS, dapat mendongkrak harga komoditas Indonesia di pasar AS. Hal ini tentu saja akan berdampak pada kinerja ekspor Indonesia. Namun demikian, menimbang

Capitalism for an Age of Discontent, dikatakan "Trump and nativist elsewhere in the world seek to blame others-migrants and bad trade agreements-for our plight; ...isolationism is not an option. We live in a highly interconnected world and this have to manage our international relations-both economic and political-better than we have in the past" (2019: 16-17).

Menjaga optimisme di tengah kebijakan tarif Trump bukan hal yang mudah. Namun demikian, dalam banyak tulisan para ekonom besar, seperti Dani Rodrik, Jagdish Bhagwati, Anne Krueger, Robert



Lawrence dan Joseph Stiglitz, dikatakan kesepakatan perdagangan multilateral dapat menjadi kesempatan untuk melakukan reformasi kebijakan domestik seperti untuk sektor perdagangan dan industri. Tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan refleksi atas implikasi kebijakan tarif balasan AS terhadap perekonomian Indonesia. Secara khusus, bagaimana Indonesia mampu menjadikan hal ini sebagai momentum untuk melakukan reformasi kebijakan bagi penguatan posisi daya saing Indonesia dalam menghadapi persaingan global.

Mengurai Permasalahan

Dalam paparan seminar nasional yang disampaikan oleh Ibu Shinta Kamdani (KADIN) terkait tema 'Tantangan Ekonomi Global dan Strategi Pertumbuhan Ekonomi Nasional, penulis mencatat tiga permasalahan yang beliau sampaikan. **Pertama**, dependensi Indonesia terhadap 25 komoditas utama ekspor hampir 2 kali lebih tinggi dari negara lain (Perbandingan dilakukan dengan negara Tiongkok, Thailand, dan AS). Hal yang sama juga untuk dependensi Indonesia terhadap 10 negara tujuan ekspor utama. Hal ini dapat menyebabkan kontribusi ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi nasional menjadi lebih rentan terhadap kebijakan negara tujuan ekspor serta fluktuasi permintaan dan harga komoditas global.

Kedua, daya saing iklim usaha Indonesia sangat fluktuatif. Hal ini merefleksikan inkonsistensi kebijakan untuk menciptakan iklim usaha yang penuh dengan kepastian. Kondisi ini secara langsung mempengaruhi persepsi pertumbuhan dan investasi di sektor manufaktur nasional. Ketiga, belum jelasnya kebijakan untuk merespon dinamika pasar, dapat menyebabkan produktifitas industri dan ekspor nasional terus turun atau stagnan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS), memperlihatkan pasar AS sangat penting bagi Indonesia, di tahun 2024, proporsi

ekspor non migas Indonesia ke AS sekitar 10,57% dan impor sebesar 4,8%. Sementara itu, kondisi di tahun 2014, proporsi ekspor non migas sebesar 10,86% dan impor sekitar 6%. Dengan demikian, dapat dikatakan dalam satu dekade ini, pangsa ekspor Indonesia terhadap AS relatif stabil, meskipun untuk pangsa impor Indonesia dari AS telah terjadi penurunan. Posisi surplus perdagangan menalami kenaikan dari 7,75 miliar US\$ (2014) menjadi 16,8 miliar US\$ (2024).

Namun demikian kinerja ekspor Indonesia yang cukup baik dengan AS akan sulit untuk dipertahankan akibat kebijakan tarif Trump. Lebih jauh, akan banyak negara terdampak atas kebijakan ini dan banyak dari negara tersebut menjadi mitra dagang utama Indonesia, seperti Tiongkok, Jepang, dan Jerman. Bahkan, Lembaga Moneter Internasional (IMF) memperkirakan ekonomi global akan tumbuh sebesar 2,8% tahun ini, turun dari perkiraan sebelumnya sebesar 3,3% (BBC, 2025). Hal ini tentu akan berdampak pada kinerja ekspor Indonesia dan dapat perlambatan laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Telaah sisi perdagangan oleh Kuncoro (2019) mengatakan empat komoditas berikut yaitu: makanan, mesin, kimia, dan tekstil menjadi penyumbang utama devisa. Namun demikian, ekspor makanan Indonesia semakin terbatas dalam konteks diversitas produk sebagaimana ditandai oleh indeks Herfindhal yang meningkat. Sementara untuk produk tekstil semakin beragam. Pada sisi lainnya Hill dan Pane (2018) mengatakan, kemampuan Indonesia untuk mengembangkan pasar komoditas elektronik, garment, dan alas kaki membutuhkan kemampuan untuk bersaing dalam lingkup global, melalui kebijakan nilai tukar, lingkungan bisnis, stabilitas politik, dan ketersediaan tenaga kerja yang terlatih serta infrastruktur yang efisien. Hill dan Pane juga menyampaikan akan tantangan dari sisi penawaran (*supply side economy*) seperti pasokan listrik yang dapat diandalkan dan ekonomis, sistem logistik yang efisien, sistem regulasi yang sederhana, jaminan atas kepemilikan, dan tenaga kerja yang terampil.

Momentum Reformasi Ekonomi

Indonesia telah melakukan negosiasi dengan AS guna meminimalkan besaran tarif sanksi dan dampak kebijakan terhadap ekonomi nasional. Lima poin diskusi Indonesia dan AS (Wisnubroto,

2025), yaitu: penyesuaian tarif impor, peningkatan impor strategis, reformasi fiskal dan kepabeanaan, penyesuaian kebijakan non tarif, serta perlindungan dan banjir impor. Penulis menilai, poin-poin tersebut justru lebih mencerminkan agenda reformasi domestik dan penyesuaian kebijakan struktural yang akan berdampak luas, tidak hanya pada AS, tetapi juga pada mitra dagang global Indonesia lainnya.

Dalam laporan Bank Dunia (2024), pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan penciptaan kesempatan kerja akan sangat tergantung pada kemajuan untuk melakukan reformasi di sisi daya saing, yang mencakup sisi fundamental (bergeser dari sektor pertanian), efisiensi, dan inovasi. Bank dunia (2024) menyampaikan dari sisi reformasi efisiensi, maka upaya untuk melakukan pendalaman keuangan, reformasi kebijakan perdagangan, dan keterbukaan investasi sangat penting untuk mendorong pertumbuhan produktivitas. Namun demikian, Bank Dunia juga mengatakan upaya ini tidaklah cukup, perlu langkah-langkah signifikan, untuk mengatasi inefisiensi birokrasi dan penegakan peraturan yang tidak konsisten untuk menarik investasi di sektor-sektor bernilai tambah tinggi. Pentingnya mewujudkan lingkungan bisnis yang baik juga disampaikan oleh ADB (2025) yang menyampaikan pelunya penyederhanaan regulasi bisnis, pengurangan hambatan birokrasi, penurunan biaya logistik, dan peningkatan akses bisnis terhadap keuangan.

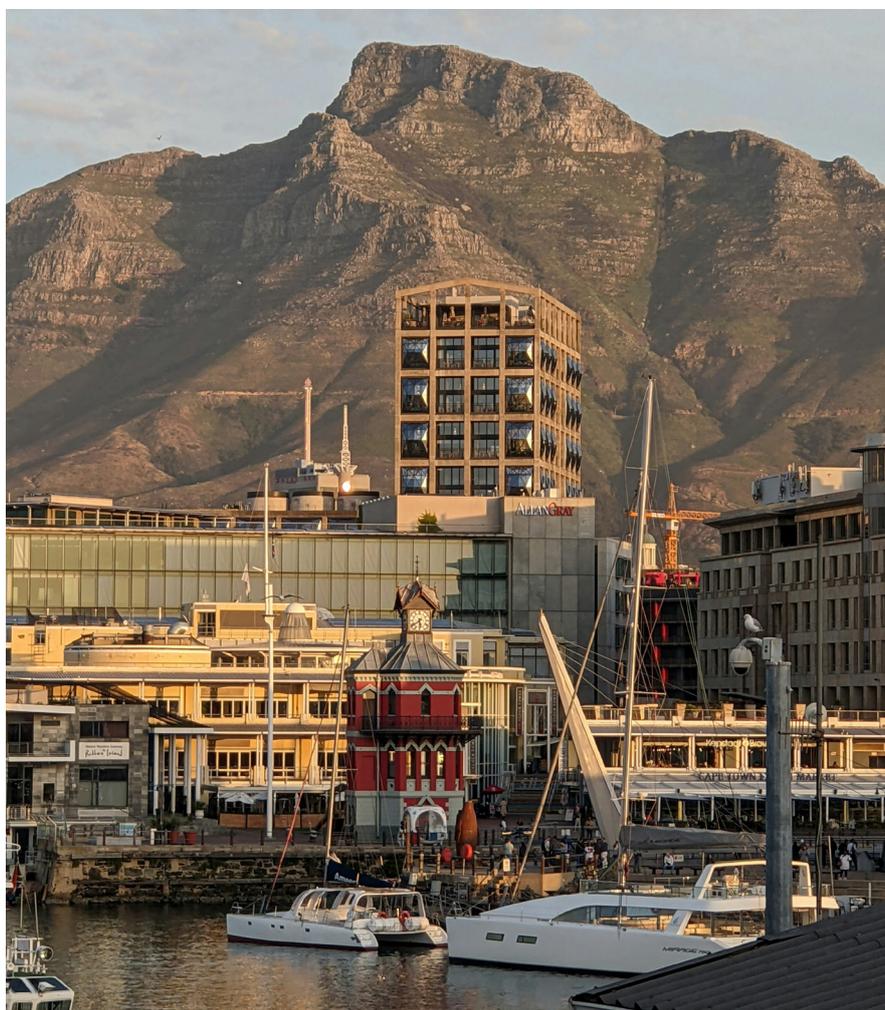
Penulis menilai Indonesia perlu konsisten untuk membuka ekonominya (*outward looking*) guna mengoptimalkan manfaat globalisasi. Sebagai perekonomian kecil yang terbuka (*small open economy*), strategi *Judo Economics* dapat melengkapi langkah Indonesia untuk memperkuat daya tahan ekonomi atas kebijakan AS dan perlambatan ekonomi global. Pertama, opimalkan strategi *niche market*. Indonesia perlu mempertimbangkan untuk menggantikan produk yang dikenakan tarif tinggi di pasa AS. Indonesia juga perlu melakukan upaya diversifikasi pasar ekspor dan mengoptimalkan beragam kesepakatan perdagangan baik yang bersifat bilateral dan multilateral. Selanjutnya, pengembangan produk yang lebih ramah lingkungan dengan kandungan teknologi yang semakin maju perlu didorong. Akhirnya, penting memajukan dan memberikan dukungan kepada pelaku usaha skala kecil yang lebih fleksibel, kemampuan adaptasi yang cepat, dan inovatif untuk tampil menghadapi perang tarif.

Opini

Menghidupkan Jalur Rempah: Menilik Kembali Hubungan Dagang Indonesia–Afrika Selatan

Oleh **Salman Al Farisi**

Duta Besar RI untuk Republik Afrika Selatan, merangkap Kerajaan Eswatini, Kerajaan Lesotho, dan Republik Botswana, berkedudukan di Pretoria (2018-2022) & Pengurus Pusat ISEI Bidang Kerjasama Internasional



Walaupun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Afrika Selatan secara resmi baru didirikan pada Agustus 1994, namun interaksi antarkedua bangsa sudah dapat dirunut sejak pertengahan abad keenambelas—ketika *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) melakukan migrasi paksa terhadap orang-orang dari Kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia, ke Tanjung Harapan, Afrika Selatan, untuk dipekerjakan sebagai

buruh perkebunan dan pekerja konstruksi pelabuhan. Kehadiran para tokoh Nusantara yang diasingkan ke Cape Town—karena menentang penjajahan Belanda (VOC)—pada pertengahan abad 17 semakin memperkuat jalinan edilogis dan budaya antara kedua bangsa. Mereka beranak pinak dan tumbuh menjadi komunitas Cape Malay yang kini diperkirakan berjumlah lebih dari 1,2 juta jiwa.

Kemudian, Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung tahun 1955 memberi makna yang sangat dalam bagi perjuangan rakyat Afrika Selatan dalam melawan kesewenang-wenangan rejim Apartheid. KAA telah menjadi platform efektif bagi para patriot Afrika Selatan—dan bangsa-bangsa Afrika lainnya—dalam menggalang dukungan internasional untuk menghapuskan penjajahan di atas bumi mereka. Hubungan kedua negara semakin diperkuat melalui Deklarasi Bersama tentang Kemitraan Strategis (Joint Declaration on Strategic Partnership) yang ditandatangani pada 17 Maret 2008, menjadikan Afrika Selatan sebagai satu-satunya negara di Afrika Sub-Sahara yang memiliki kemitraan strategis resmi dengan Indonesia.

Tonggak-tonggak relasi sosial, budaya, politik, dan ekonomi tersebut menjadi deviden diplomasi yang sangat berharga. Pertanyaan yang mengemuka kemudian adalah bagaimana memonetasi deviden tersebut menjadi tindakan nyata yang dapat lebih mengintensifkan hubungan kedua negara dan bangsa agar lebih maju, produktif, dan mensejahterakan?

Kinerja perdagangan bilateral

Hampir serupa dengan Indonesia, Afrika Selatan mencakup wilayah yang luas dan kaya akan sumberdaya alam, termasuk cadangan mineral yang sangat penting untuk transisi energi global, dan akhir-akhir ini menjadi incaran para investor, seperti tembaga, kobalt, dan platinum. Hanya saja, keterbatasan dukungan infrastruktur—dari pelabuhan yang tidak efisien, jaringan jalan dan kereta api yang semakin menua, hingga sistem distribusi air yang sudah usang—terus menghambat pertumbuhan ekonomi pada dekade silam. Pertumbuhan ekonomi Afrika Selatan pada tahun 2025 diperkirakan hanya berkisar antara 0,5% (skenario optimis) hingga 1,3% (skenario

optimis), sedikit lebih baik dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 0,8%.

Namun, tingkat pengangguran diperkirakan akan meningkat dari 32,7% pada tahun 2024 menjadi 33,2% pada tahun 2025. Pengangguran di kalangan pemuda (sekitar 60%) tetap menjadi isu yang mendesak. Afrika Selatan membutuhkan pertumbuhan ekonomi setidaknya 2,0% per tahun agar mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja dan menahan kenaikan tingkat pengangguran.

Berlatarkan pada situasi demikian, hubungan perdagangan antara Indonesia dengan Afrika Selatan tetap melaju, meskipun pertumbuhannya tidak terlalu melonjak. Nilai perdagangan bilateral pada tahun 2024 sebesar US\$ 2,4 milyar, sedikit mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 sebesar US\$ 2,2 milyar (Catatan KBRI Pretoria dan ITPC Johannesburg). Setidaknya selama lima tahun terakhir Indonesia mencatatkan defisit pada negara perdagangan dengan Afrika Selatan. Mata dagangan Indonesia didominasi oleh minyak sawit dan turunannya (US\$ 2,8 juta). Selain itu, mesin dan kendaraan bermotor, kopra, dan karet alam. Sedangkan impor utama Indonesia kebanyakan berupa bahan baku industri, seperti ferro-alloys (US\$ 7,4 juta), chromium ores dan konsentrat (US\$ 5,8 juta), juga biji dan konsentrat mangan dan gula.

Nilai dan jenis barang yang diperdagangkan oleh kedua negara masih jauh dari potensinya. Upaya untuk meningkatkan intensitas perdagangan

kedua negara, termasuk melalui pembentukan perjanjian dagang, sejauh ini masih jalan di tempat. Pihak Afrika Selatan tampak kurang proaktif menanggapi prakarsa tersebut, dengan selalu berlindung di balik kesepakatan *Southern African Customs Union* (SACU). SACU adalah organisasi kerjasama ekonomi/perdagangan regional yang beranggotakan Afrika Selatan, Botswana, Lesotho, Namibia, dan Eswatini. Gagasan tentang pengaturan preferensi dagang untuk komoditas tertentu juga pernah bergulir, namun belum menunjukkan hasil. Oleh karena itu, forum konsultasi bilateral, seperti *Indonesia – South Africa Joint Trade Commission* (JTC)—yang sudah terbentuk sejak tahun 2005 dan terakhir bertemu pada 21 Juli 2017, perlu lebih diaktifkan kembali untuk membahas hubungan ekonomi dan perdagangan yang lebih baik.

Mengatasi rintangan

Konsultasi bilateral tidak cukup hanya pada tingkat JTC. Dialog antarpemimpin kedua negara hendaknya dilakukan untuk mengangkat kebijakan strategis yang bakal menjadi peta jalan kerjasama ekonomi yang lebih produktif, memperkuat rantai pasok industri, dan membangun "*collective strategic autonomy*" di tengah geopolitik dan geoekonomi yang terpapar sangat dinamis. Keterlibatan pemimpin tingkat tinggi akan memperkuat koordinasi antara kementerian/lembaga, beserta para pemangku kepentingan lainnya, termasuk kalangan pengusaha. Pada tataran kebijakan dan kelembagaan nasional, Indonesia perlu lebih serius untuk mengintegrasikan kerjasama

ekonomi dan perdagangan ke dalam kebijakan luar negeri. Pelaku diplomasi boleh jadi datang dari berbagai pemangku kepentingan, akan tetapi haluan hendaknya merujuk pada satu kerangka kebijakan yang dilaksanakan secara sinergis, terkoordinasi, dan terukur. Langkah ini juga harus ditunjang dengan upaya penguatan kapasitas diplomasi dan perangkatnya dengan dukungan sumberdaya yang memadai. Interaksi di kalangan pengusaha kedua negara juga harus lebih digalakkan agar saling memahami mata dagangan dan peluang akses pasar, iklim usaha, dan budaya bisnis di masing-masing negara, bahkan kawasan sekelilingnya. Para pelaku usaha harus lebih giat membangun kemitraan, baik dalam hal produksi maupun distribusi. Hanya mengandalkan kegiatan perdagangan semata tidak cukup efektif untuk memperluas pasar. Perlu kajian lebih mendalam tentang kegiatan *investment-led trading*, mengingat kedua negara sama-sama bersaing untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru.

Lebih lanjut, dukungan pembiayaan sangat penting bagi setiap usaha untuk meningkatkan ekspor ke negara-negara berkembang, termasuk ke Afrika Selatan. Harus ada kepastian jaminan kredit, investasi lintas negara, dan skema pembiayaan untuk proyek-proyek infrastruktur. Pengusaha Indonesia bisa berharap pada Danantara untuk memainkan peran pendukung pada greget ekspansi pasar non-tradisional, seperti Afrika Selatan.

Fair but Unfair: Siapa Paling Banyak Menghambat Perdagangan Bebas?

Negara	SPS	TBT	ADP	CV	SG	SSG	QR	TRO	XS	Total
USA	3.315	2.043	505	179	3	496	59	52	13	6.665
Brazil	2.012	1.418	166	3		1		16		3.616
China	1.384	1.652	123	11	1		42	10		3.223
European Union	969	1.487	144	26		71	18	87		2.802
Japan	956	960	9		173	85	18		2.201	2.201
Korea	746	1.158	43		75	92	67		2.181	2.181
Thailand	506	760	58		2	112	23		1.461	1.461
Australia	532	239	88	18	178	2	6		1.063	1.063
India	276	273	376	26	4		59	3		1.017
Vietnam	137	217	26	1	4		2		387	387
Malaysia	53	273	32		3		13		374	374
Indonesia	142	142	52	11		2	1		350	350
United Kingdom	12	65		1		78				78
Cambodia	22			22						22

- Amerika Serikat menjadi negara yang paling banyak menaruh hambatan pada perdagangan internasionalnya terutama terhadap barang impor dari negara lain, maka pengenaan kebijakan tarif oleh Trump sebagai bentuk Fair Trade juga patut dipertanyakan.
- Indonesia sendiri merupakan negara yang sedikit menerapkan hambatan pada perdagangan internasional bahkan posisi saat ini pengawasan barang berada di post-border yang idealnya berada di border, hal ini berdampak terhadap banyaknya barang impor yang kurang diawasi dengan baik oleh otoritas terkait.

Opini

Indonesia Dalam Pusaran Neo Geopolitik

Oleh **F. Harry Sampurno, Ph.D.**

Pengurus Pusat ISEI Bidang VII (Kerjasama Internasional)

Bak petir disiang bolong, AS tiba tiba mengenakan tarif seenaknya terhadap barang yang diimpor dari dua negara tetangga terdekatnya yaitu Canada dan Mexico yang sebenarnya terikat dalam perjanjian USMCA yang mengganti NAFTA sejak 1 Juli 2020. Kebijakan berupa **"Executive Order 14257"** itu dikenakan kepada semua mitra dagang AS dan ditandatangani oleh Presiden Trump pada 2 April 2025 yang menyebutnya sebagai **"Liberation Day"**.

Tsunami tarif oleh AS memperjelas perubahan peta geoekonomi sejak berakhirnya "Perang Dingin" yang ditandai dengan bubarnya Uni Soviet tahun 1991. Pergeseran geoekonomi makin dirasakan saat terjadinya Krisis Keuangan Asia 97-98, Global Financial Crisis 2008, Great Recession 2007-2009 dan Pandemic COVID 2020-2021.

Namun sebenarnya pergeseran geoekonomi ini lebih mengkonfirmasi kekacauan geopolitik yang dimulai dengan invasi unilateral AS ke Afghanistan dan Irak yang disusul dengan pergolakan di berbagai negara timur tengah, perang Nagorno Karabakh, Sahel, Ukraina sampai dengan Israel menghancurkan-leburkan Gaza yang masih berlangsung.

Tulisan ini akan lebih melihat Indonesia dari perspektif geoekonomi menghadapi tsunami tarif di AS. Walaupun pelaksanaannya ditunda sampai 90 hari, tetapi kekacauan perdagangan dunia sudah terjadi khususnya di Indonesia yang termasuk dalam negara yang dikenai tarif >30% sekelas negara2 Aljazair, Angola, Bangladesh, Bosnia, Botswana, Kamboja, China, Fiji, Guyana, Irak, Laos, Lesotho, Libya, Madagascar, Mauritius, Moldova, Myanmar, Nauru, Serbia, Srilanka, Swiss, Suriah, Taiwan, Thailand dan Vietnam.

Bahkan setelah delegasi perunding Indonesia yang terdiri dari para pejabat tertinggi bidang ekonomi Indonesia bertandang ke AS, justru komoditi tekstil kita dikenai tarif lebih tinggi yaitu 42%.

Tentu saja akan sangat banyak dugaan ataupun analisis mengapa Indonesia diperlakukan seperti itu oleh AS, tetapi tulisan ini hanya akan menyoroti dari dua hal yaitu struktur ekspor Indonesia dan intensitas teknologi (kedalaman) ekspor Indonesia ke AS.

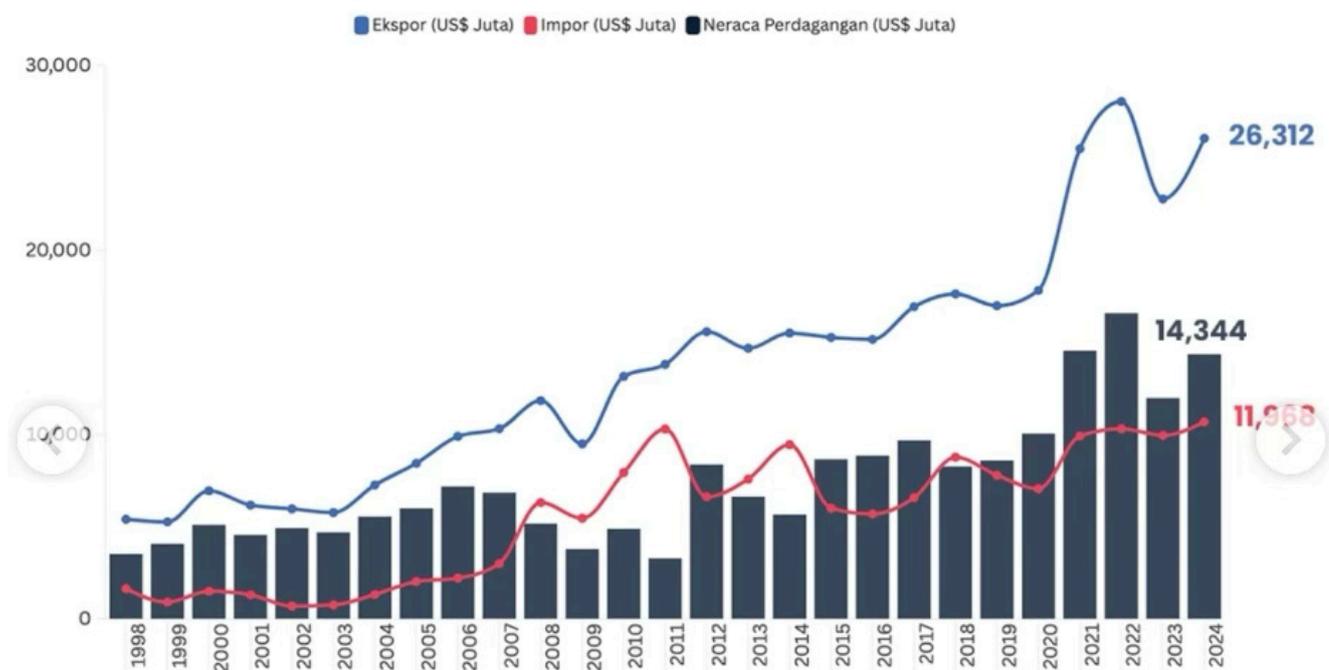
Struktur ekspor Indonesia berdasarkan negara tujuan utama adalah sebagaimana dapat dilihat dalam gambar dari indonesiabaik.id yang mengambil data Januari-Desember 2024 menunjukkan

porsi terbesar ekspor Indonesia adalah RRC dgn nilai (FOB) US\$ 62,4 milyar disusul ASEAN senilai US\$ 53,8 milyar baru AS sebesar US\$ 26,3 milyar dan India/Jepang masing2 US\$ 20 milyar.

Sedangkan dari sisi intensitas atau kedalaman ekspor maka porsi dari 10 komoditas utama ekspor adalah 23% dari mineral dan migas dgn dominasi batubara 60% dan gas 15%, minyak sawit (11%), besi-baja (10%), peralatan listrik (5,5%), kendaraan (4,3%), mineral non



Perdagangan Indonesia-Amerika Serikat



Sumber: NEXT Indonesia mengolah data dari UN Comtrade, CEIC, BPS

nikel (3,3%) diikuti batu/ logam mulia, nikel, permesinan dan alas kaki masing2 sekitar 2%.

Jelas sekali bahwa ekspor Indonesia masih sangat dangkal berasal dari SDA dengan nilai tambah rendah, sedangkan yang berasal dari sektor manufaktur dengan nilai tambah sedang-tinggi masih sangat terbatas.

Sedangkan khusus untuk ekspor kita ke AS memang meningkat dari tahun ke tahun sejak 1998 dan selalu menunjukkan neraca yang surplus dan makin besar mencapai US\$ 14 milyar pertahun sejak tahun 2021.

Adapun jenis komoditas ekspor Indonesia ke AS pada tahun 2024 dengan nilai lebih dari US\$ 400 juta adalah mesin dan perlengkapan listrik sebesar US\$ 1,2 milyar, alas kaki US\$ 658 juta, pakaian dan asesorisnya US\$ 1,1 milyar, minyak sawit US\$ 507 juta dan perabotan/alat penerangan US\$ 410 juta.

Walaupun hampir seluruh ekspor ke AS sudah berupa produk manufaktur atau pengolahan, namun intensitas teknologinya rendah dan tentunya nilai tambahnya juga rendah.

Dengan berbekal data-data diatas, jelas bahwa pasar tujuan ekspor ke AS cukup signifikan walaupun nilainya hanya 1/3 dari nilai ekspor kita ke RRC atau hanya 1/2 dari nilai ekspor kita ke negara2 ASEAN. Pengenaan tarif yang tinggi di AS akan berpengaruh dalam jangka pendek terhadap kinerja ekspor kita dan tentunya pada perkembangan industri kita sendiri. Namun yang lebih penting daripada "mengemis" penurunan tarif, adalah meneliti dan mengetahui seberapa penting ekspor kita terhadap ekonomi dan atau pengusaha importir di AS sendiri. Apakah produk kita mempunyai pesaing dari negara yang mendapat tarif lebih rendah? Apakah produk kita mempunyai elastisitas harga yang tinggi atau rendah? Apakah produk kita mempunyai merk atau keunikan tersendiri?

Kedepannya untuk jangka menengah perlu betul didukung program pendalaman atau intensitas teknologi dari produk yang kita ekspor. Walaupun sudah dalam bentuk produk manufaktur tetapi jika masih berteknologi rendah yang biasanya bersifat padat karya, maka akan lebih mudah bagi importir di AS memindahkan lokasi produksinya ke negara lain yang dikenakan tarif lebih rendah.

Jika produknya sudah berteknologi menengah tinggi, biasanya adalah "intermediate goods" yang bernilai tambah lebih tinggi dan tingkat elastisitas relatif rendah sehingga lebih sulit untuk dipindahkan. Tetapi kondisi ini lebih menjadi sasaran bagi AS untuk ditarik kembali atau dipindahkan ke AS sendiri karena dengan nilai tambah yang lebih tinggi, maka bisa dikerjakan dengan biaya SDM yang tinggi di AS.

Tentu saja dalam jangka panjang kita harus terus mendiversifikasi negara tujuan ekspor untuk tidak tergantung dari satu dua negara dan dengan mendorong sektor manufaktur dengan hilirisasi dan hulunisasi, diharapkan ekspor Indonesia menjadi makin sehat dan kuat sebagai penopang pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia emas 2045 dalam neo geopolitik.

Opini

Pangan Jadi Peluru, Dagang Jadi Perang: Ketahanan Pangan Indonesia di Tengah Krisis Geopolitik Global

Oleh **Ofanto**, Mahasiswa Doktor Ilmu Ekonomi, Universitas Andalas dan **Elfindri** Professor Ekonomi SDM, Universitas Andalas

Perang dalam Wajah Baru

Dunia modern tidak lagi sepenuhnya didefinisikan oleh dentuman senjata atau invasi militer. Dalam era geopolitik kontemporer, perang tampil dalam wajah baru—lebih senyap namun tak kalah mematikan. Saat ini, war game tak lagi terjadi di medan bersenjata, melainkan di arena dagang, jalur logistik, dan meja perundingan internasional. Perdagangan menjadi senjata, pangan menjadi peluru.

Geopolitik global telah bergeser ke pola konflik yang multidimensi. Ketika konflik Rusia-Ukraina meletus, yang terhambat bukan hanya pasokan energi, tetapi juga ekspor gandum dan pupuk yang berdampak luas hingga ke Afrika dan Asia. Pandemi COVID-19 sebelumnya pun menjadi pelajaran bahwa rantai pasok pangan global sangat rapuh ketika krisis datang. Negara-negara berebut akses bahan pokok, sementara embargo dan larangan ekspor menjadi alat diplomasi baru.

Dalam kondisi semacam ini, negara-negara yang terlalu bergantung pada pangan impor menghadapi risiko ganda: ketidakstabilan harga dan ancaman pasokan. Ketahanan pangan kini diposisikan sebagai bagian integral dari diplomasi internasional dan strategi pertahanan nasional. Tak heran jika banyak negara kini memasukkan sektor pangan ke dalam sistem *early warning* mereka, sejajar dengan intelijen dan keamanan negara.

Indonesia, sebagai negara berpenduduk terbesar keempat dunia, tentu tidak bisa bergantung sepenuhnya pada pasar luar negeri dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Ketergantungan pada impor gandum, kedelai, dan daging menjadikan kita sangat rentan ketika konflik global atau hambatan logistik melanda. Dalam

konteks ini, pertanyaan yang layak diajukan adalah: "Apakah kita telah siap menghadapi dunia yang menempatkan pangan sebagai alat tawar-menawar politik global?"

Ketergantungan Pangan dalam Angka

Untuk memahami betapa strategis dan rentannya posisi Indonesia dalam lanskap pangan global, kita perlu melihat fakta konkret melalui data impor pangan pokok. Tiga komoditas kunci: gandum, kedelai, dan daging sapi telah menjadi indikator utama dari ketergantungan kita pada pasar internasional. Dalam

lima tahun terakhir, angka-angka ini menunjukkan kecenderungan yang konsisten: "Indonesia belum beranjak dari status sebagai negara pengimpor utama untuk kebutuhan pangannya."

Gandum: Tidak Bisa Ditanam, Selalu Diimpor

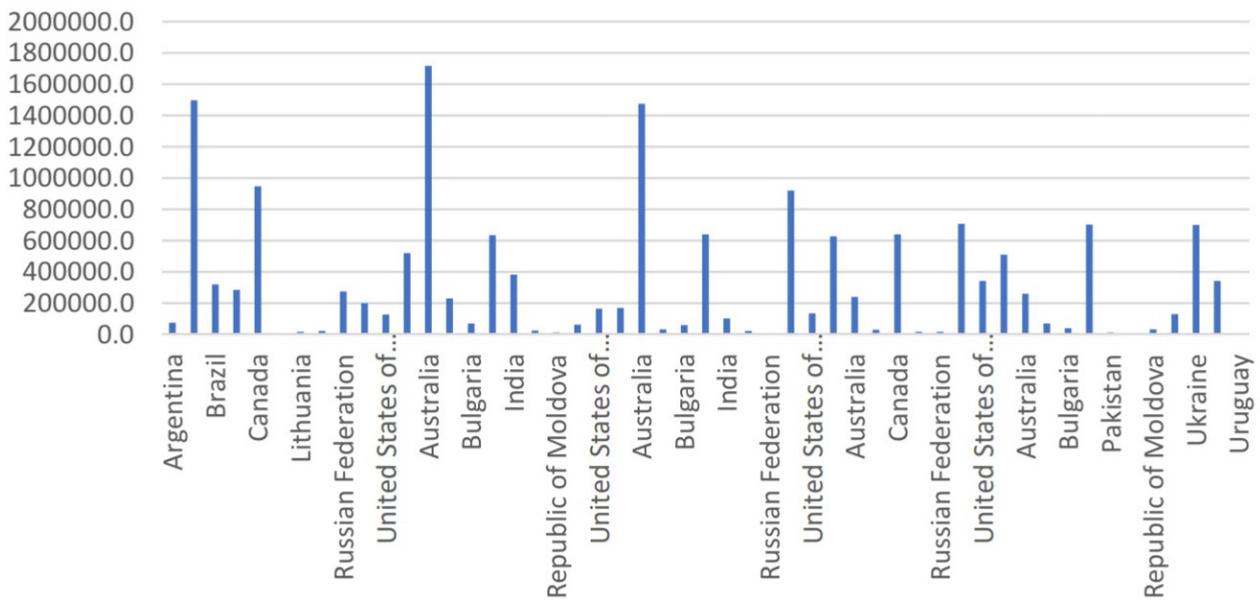
Indonesia merupakan negara pengimpor gandum terbesar di Asia Tenggara. Menurut data FAOSTAT (Food and Agricultural Organization of The United Nations Statistic) selama periode tahun 2019–2023, impor gandum Indonesia berkisar USD 16.532.459.000.

Tabel Impor Gandum Indonesia Tahun 2019-2023

Tahun	Nilai Impor (miliar USD)	Negara Pemasok Utama	% Kontribusi
2023	3.758.407.000	Australia	39,80
		Kanada	25,20
		Rusia	7,30
2022	3.810.399.000	Australia	45,10
		Kanada	16,60
		Argentina	13,70
2021	3.548.356.000	Australia	41,60
		Ukraina	25,90
		Kanada	18,00
2020	2.616.036.000	Ukraina	27,00
		Kanada	24,40
		Argentina	24,00
2019	2.799.261.000	Pakistan	24,70
		Brasil	22,30
		Moldova	17,80
Total	16.532.459.000		

Source: Data processed FAOSTAT 04 April 2025

Summary of Indonesian Wheat Imports (2019-2023)



Data lima tahun terakhir menunjukkan bahwa Indonesia sangat bergantung pada impor gandum, dengan nilai yang relatif stabil pada kisaran 2,6 hingga 3,8 miliar USD per tahun. Australia secara konsisten menjadi pemasok utama sejak 2021, menyumbang lebih dari 40% pasokan, diikuti oleh Kanada dan negara-negara seperti Ukraina dan Argentina. Pola ini mencerminkan konsentrasi sumber pasokan yang tinggi dan menimbulkan risiko strategis terhadap ketahanan pangan nasional jika terjadi gangguan pasokan.

Pada tahun-tahun sebelumnya, seperti 2019 dan 2020, terdapat variasi lebih luas dalam mitra dagang, termasuk Pakistan, Brasil, dan Moldova. Namun, sejak konflik Rusia-Ukraina dan dinamika perdagangan global pascapandemi, Indonesia tampaknya mempersempit jangkauan pasokannya. Ketergantungan terhadap segelintir negara pengekspor menjadikan Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga global dan ketegangan geopolitik, yang dapat berdampak langsung pada stabilitas pasokan bahan baku industri makanan dalam negeri.

Kedelai: Terpinggirkan di Tanah Sendiri

Kedelai merupakan bahan utama tempe dan tahu, pangan rakyat yang sangat populer. Namun ironisnya, menurut data FAOSTAT (*Food and Agricultural Organization of The United Nations Statistic*) pada tahun 2023, Indonesia mengimpor kedelai dengan nilai impor USD 1,4 miliar.

Data lima tahun terakhir mengungkap ketergantungan ekstrem Indonesia pada kedelai impor AS yang mencapai rata-rata 88,3% dari total pasokan. Dominasi ini bersifat struktural dan hampir tak tergoyahkan—pada 2019 bahkan menyentuh 93,9%. Kanada sebagai pemasok kedua hanya berkontribusi rata-rata 9,4%, sementara negara lain seperti Argentina dan Malaysia hanya memenuhi

kurang dari 4%. Pola ini mencerminkan kegagalan diversifikasi pemasok sekaligus menciptakan kerentanan geopolitik, di mana fluktuasi kebijakan perdagangan AS langsung berdampak sistemik pada industri pangan nasional.

Dalam periode 2019-2023, Indonesia menguras devisa sebesar USD 6,64 miliar untuk impor kedelai—setara dengan 4,5

Tabel Impor Kedelai Indonesia Tahun 2019-2023

Tahun	Total Nilai Impor (USD)	Negara	Kontribusi Pemasok Utama (%)
2023	1.463.751.000	AS	86,20
		Kanada	12,20
		Argentina	1,10
2022	1.632.031.000	AS	83,80
		Kanada	11,40
		Argentina	2,60
2021	1.472.751.000	AS	87,40
		Kanada	9,20
		Argentina	3,50
2020	1.003.422.000	AS	90,30
		Kanada	9,40
		Malaysia	0,30
2019	1.064.564.000	AS	93,90
		Kanada	5,00
		Malaysia	0,40
Total	6.636.519.000		

Source: Data processed FAOSTAT 04 April 2025

kali anggaran riset pertanian nasional. Lonjakan tertinggi terjadi pada 2022 (USD 1,63 miliar) saat inflasi pangan global mencapai 18,4% (World Bank, 2023), membuktikan ketiadaan mekanisme lindung nilai. Yang lebih memprihatinkan, 72% industri tahu/tempe nasional bergantung pada pasokan impor (BPS 2023). Ketergantungan ini menjadi senjata makan tuan: ketika AS membatasi ekspor akibat Perang Dagang 2021, harga kedelai domestik melonjak 34% dalam sebulan, mengancam ketahanan pangan rumah tangga.

Daging Sapi: Impor sebagai Penyeimbang Pasokan

Permintaan daging sapi nasional terus meningkat, terutama di wilayah perkotaan dan selama momen hari besar keagamaan. Konsumsi daging sapi per kapita di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 2,25 kg/tahun, berdasarkan data dari OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) FAO. Sisanya dipenuhi melalui impor, baik dalam bentuk daging beku maupun sapi hidup yang akan digemukkan di Indonesia. Pada 2023, Indonesia mengimpor sekitar 202 ribu ton daging sapi, dengan negara asal utama adalah Australia, Brasil, dan India.

Yang menarik, ketergantungan terhadap impor daging juga menyimpan dimensi geopolitik tersendiri. Australia, sebagai mitra dagang utama dalam ekspor sapi ke Indonesia, memiliki posisi tawar yang sangat besar dalam menentukan harga dan volume pasokan. Ketika hubungan diplomatik terganggu, tidak tertutup kemungkinan perdagangan sapi pun bisa terdampak.

Melalui data tersebut, terlihat bahwa ketergantungan Indonesia terhadap pangan impor bukan hanya tinggi, tetapi juga semakin terstruktur dalam rantai pasok nasional. Ketergantungan ini membawa risiko terhadap ketahanan pangan nasional, apalagi di tengah ketidakpastian global. Oleh sebab itu, perlu pendekatan kebijakan yang lebih strategis, tidak hanya dalam aspek pertanian teknis, tetapi juga dalam hal kedaulatan politik pangan.

Dampak Impor terhadap Kesenjangan Tenaga Kerja

Selain kerentanan geopolitik, pola impor pangan strategis juga memperdalam masalah ketenagakerjaan. Impor gandum, kedelai, dan daging dalam bentuk mentah (raw commodity) hanya menyentuh lapisan terbatas rantai nilai khususnya logistik dan distribusi tanpa membangun employment multiplier effect yang signifikan. Padahal, jika

komoditas ini diproduksi dan diolah di dalam negeri, akan tercipta efek berantai: dari sektor pertanian, industri pengolahan, hingga pemasaran.

Berdasarkan teori backward-forward linkages (Hirschman, 1958), ketergantungan impor menyebabkan opportunity cost berupa hilangnya potensi penciptaan lapangan kerja. Misalnya, setiap USD 1 juta impor kedelai hanya menyerap 42 tenaga kerja di sektor distribusi (BPS, 2023), sementara produksi lokal dapat membuka 167 pekerjaan mencakup budidaya, penggilingan, dan industri olahan. Impor biji gandum pada tahun 2023: USD 3,7 miliar hanya menyokong industri tepung terigu (capital-intensive), sementara budidaya komoditas substitusi seperti singkong/sagu berpotensi membuka 1,2 juta lapangan kerja petani dan pengolah MOCAF (modified cassava flour) (Kementan, 2024). Demikian halnya dengan impor daging sapi yang minim penyerapan tenaga kerja, kontras dengan potensi peternakan rakyat yang mampu menyerap 240.000 pekerjaan terintegrasi.

Oleh karena itu, selain risiko devisa dan geopolitik, kebijakan impor pangan harus mempertimbangkan dimensi ketenagakerjaan. Transformasi menuju substitusi impor bukan sekadar mengurangi ketergantungan, tetapi juga membangun ekosistem lapangan kerja berbasis nilai tambah (*value-added employment*).

Pangan dalam Pusaran Politik Global

Perdagangan pangan tidak lagi sekadar urusan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, melainkan telah berubah menjadi arena strategis dalam persaingan geopolitik antarnegara. Sebagaimana dicatat oleh Clapp (2017) dalam studinya tentang geopolitik pangan, pangan kini menjadi instrumen politik yang efektif untuk mengekang atau memperkuat posisi suatu negara dalam percaturan global. Negara-negara besar memanfaatkan kebijakan ekspor-impor pangan sebagai alat diplomasi maupun tekanan, yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan politik di negara-negara mitra dagang mereka. Fenomena ini menunjukkan bahwa pangan telah memasuki ranah keamanan nasional, sejalan dengan konsep *food security as national security*.

Dampak geopolitik terhadap pangan juga mengungkap risiko mendasar bagi negara pengimpor, terutama yang bergantung besar pada pangan impor. Studi oleh Hendrix dan Haggard (2015) menunjukkan bahwa ketergantungan

pangan impor berpotensi memperlemah kedaulatan nasional, karena negara harus menyesuaikan kebijakan dalam negeri agar tetap mendapat akses ke pasar global. Selain itu, ketika negara pengekspor memberlakukan pembatasan ekspor sebagai respons terhadap ketidakstabilan politik atau untuk melindungi stok nasional, negara pengimpor bisa menghadapi kekurangan pasokan dan lonjakan harga yang mengancam stabilitas sosial-politik.

Sebaliknya, beberapa negara telah menyadari pentingnya ketahanan pangan sebagai pilar strategi nasional dan mengadopsi pendekatan komprehensif untuk mengurangi ketergantungan pangan impor. Misalnya, Tiongkok secara agresif mengembangkan kebijakan *Food Sovereignty* yang mengedepankan produksi lokal dengan dukungan teknologi pertanian canggih dan penguatan cadangan pangan strategis. Sebagaimana dicatat oleh Roberts dan Gehlhar (2018), Tiongkok menggunakan kombinasi investasi pada irigasi, varietas unggul, serta subsidi yang terarah untuk mencapai swasembada beras dan kedelai. Demikian pula, India telah menerapkan program *National Food Security Act* dan memperkuat infrastruktur pertanian guna memastikan ketahanan pangan di tengah fluktuasi pasar global dan ketegangan geopolitik, seperti yang diulas oleh Pingali dan Kumar (2017).

Upaya Substitusi: Menuju Kemandirian Pangan

Untuk mengurangi kerentanan terhadap dinamika eksternal, strategi substitusi berbasis sumber daya lokal menjadi langkah strategis. Substitusi bukan dimaknai sebagai autarki atau penutupan pasar, melainkan sebagai diversifikasi dan penguatan basis produksi domestik.

Cassava sebagai Alternatif Gandum

Indonesia merupakan salah satu produsen utama singkong (cassava) dunia. Singkong dapat diolah menjadi tepung singkong termodifikasi (*modified cassava flour/MOCAF*) yang memiliki potensi menggantikan tepung terigu dalam berbagai produk makanan. Pengembangan cassava tidak hanya meningkatkan kemandirian pangan, tetapi juga memberdayakan petani lokal.

Namun demikian, tantangan utama terletak pada peningkatan kualitas dan daya saing MOCAF agar dapat digunakan secara luas dalam industri pangan modern. Hal ini memerlukan investasi dalam riset dan pengembangan, teknologi pengolahan, serta pelatihan bagi pelaku UMKM.

Penguatan Kedelai Lokal dan Diversifikasi Protein Nabati

Revitalisasi produksi kedelai lokal dapat dilakukan dengan memberikan insentif kepada petani, memperbaiki tata niaga, dan memperkenalkan varietas unggul yang lebih adaptif. Selain itu, diversifikasi sumber protein nabati, seperti kacang hijau, kacang tolo, dan mikroprotein dari fermentasi pangan juga perlu dijajaki untuk memperkaya pilihan bahan pangan berbasis lokal.

Peternakan Rakyat sebagai Penyangga Daging Domestik

Pengembangan peternakan rakyat berbasis lahan lokal berpotensi meningkatkan pasokan daging domestik sekaligus menciptakan lapangan kerja. Integrasi dengan sektor pertanian, seperti pemanfaatan limbah pertanian sebagai pakan, dapat mendorong efisiensi. Perlu dukungan pemerintah dalam bentuk pelatihan teknis, penguatan koperasi peternak, serta infrastruktur logistik seperti rantai pendingin (cold chain) untuk menjamin distribusi yang efisien dan berkualitas.

Kemandirian Pangan sebagai Pilar Ketahanan Nasional

Kemandirian pangan tidak berarti menutup diri dari perdagangan global, melainkan menciptakan cadangan

domestik yang cukup untuk menjaga stabilitas nasional. Negara yang mampu mencukupi kebutuhan pangannya sendiri memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam hubungan internasional, serta ketahanan yang lebih tinggi dalam menghadapi gejolak global.

Dalam kerangka ini, pembangunan kemandirian pangan harus menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan nasional, termasuk dalam perencanaan pembangunan jangka menengah dan panjang.

Rekomendasi Kebijakan:

Diversifikasi Komoditas Strategis: Menambah fokus pada komoditas selain beras, seperti gandum, kedelai, dan daging dalam strategi ketahanan pangan nasional.

Investasi pada Riset Substitusi Pangan Lokal: Mendukung pengembangan cassava, kedelai lokal, serta protein alternatif berbasis teknologi.

Penguatan Kelembagaan Pangan Nasional: Badan Pangan Nasional dapat berperan sebagai koordinator lintas sektor dalam perencanaan dan implementasi substitusi pangan.

Penguatan Ekonomi Desa dan UMKM Pangan: Memberikan pelatihan, insentif, dan akses pasar bagi pelaku lokal.

Pendidikan Konsumen: Mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi produk pangan lokal sebagai bagian dari kontribusi terhadap kedaulatan nasional.

Saatnya Menguatkan Pilar Domestik

Dalam menghadapi kompleksitas dunia yang semakin kompetitif, kemandirian pangan bukan hanya pilihan, melainkan keharusan. Ketika pangan dapat menjadi alat tekanan dan perdagangan menjadi arena tarik ulur kekuatan politik, Indonesia perlu memperkuat fondasi domestiknya.

Membangun kemandirian pangan adalah bagian dari upaya membangun masa depan yang berdaulat, tangguh, dan inklusif. Kemandirian ini hanya dapat dicapai melalui sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat luas. Pertanyaannya kini adalah: "Apakah kita siap menghadapi dunia yang menjadikan pangan sebagai instrumen politik global?"



Kegiatan ISEI

ISEI Dorong Soemitronomics Sebagai Strategi Pembangunan Nasional



Cek disini untuk informasi selengkapnya

Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) bersama dengan BPS RI, KPw Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Universitas Mulawarman, ISEI Cabang Samarinda, dan BPD Kaltimarta mengadakan kegiatan ISEI Panel Discussion “Soemitronomics: Gagasan, Langkah, dan Pengaruh Ekonomi Soemitro Djojohadikoesoemo”. Diskusi Panel ini dibuka oleh Prof. Dr. Lambang Subagiyono, M.Si. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Mulawarman. Selanjutnya, Bapak Dr. Solikin M. Juhro memberikan Keynote Speech yang menekankan pemikiran Prof. Soemitro menjadi sangat relevan, karena pada kondisi ini *global fragmented* terjadi dari awalnya *Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity* (VUCA) menjadi *Turbulence, Uncertainty, Novelty, dan Ambiguity* (TUNA).

Bapak Budi Widihartanto selaku Kepala Perwakilan BI Provinsi Kalimantan Timur juga memberikan Opening Speech yang dilanjutkan dengan pemberian apresiasi dari ISEI Cabang Samarinda kepada BI Provinsi Kalimantan Timur atas kontribusinya mendukung applied research yang berkontribusi pada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Dalam kegiatan panel diskusi ini juga, Ibu Amalia Adininggar Widyasanti,

Ph.D. selaku Kepala BPS RI dan Ketua Bidang II PP ISEI yang menyampaikan perkembangan ekonomi Indonesia dari masa ke masa dimana disampaikan perlunya industrialisasi dari produk pertanian Indonesia.

Selanjutnya, Prof. Ari Kuncoro menyampaikan pentingnya konsep trilogi pembangunan dalam serta aplikasi dari nasionalisme, sosialisme, dan pragmatisme di Tengah rivalitas global yang semakin tajam. Dalam sesi pemaparannya, Prof. Ari Kuncoro juga menekankan pentingnya sentralisme Indonesia dalam memandang rivalitas AS-Tiongkok dengan menerapkan langkah-langkah preventif dan penuh kehati-hatian sesuai dengan pemikiran Prof. Soemitro Djojohadikoesoemo sebagai fondasi ekonomi bangsa. Sesi kedua, disampaikan oleh Prof. Ahmad Erani Yustika yang menyampaikan bahwa Prof. Soemitro Djojohadikoesoemo menyampaikan fondasi fundamental strategi pertumbuhan ekonomi bangsa. Pertama, Gerakan ekonomi benteng dimana memberikan keistimewaan pada importir lokal dan memberikan kredit usaha rakyat kepada usaha kecil dan menengah (UKM). Kedua, Prof. Soemitro Djojohadikoesoemo juga menekankan pada pentingnya efisiensi dalam birokrasi dengan regulasi yang efisien karena “high

cost economy” hanya akan memberatkan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, pentingnya riset dan inovasi dalam pertumbuhan serta pembangunan ekonomi serta integrasinya dalam mendukung industri dalam negeri.

Panel diskusi yang dimoderasi oleh Bapak Dr. Aji Sofyan Effendi, M.Si. selaku Ketua ISEI Cabang Samarinda ini diikuti oleh 250 peserta offline dan 250 peserta online. Terakhir, kegiatan ini ditutup oleh Bapak Dr. Zainal Abidin, S.E., M.M. selaku Dekan FEB Universitas Mulawarman.

Kegiatan ini diharapkan menjadi koridor awal strategi rekonfigurasi pembangunan ekonomi yang dekat dengan stabilitas dan kesejahteraan publik dimana pertumbuhan ekonomi harus berorientasi pada rakyat berbasis koperasi rakyat. ISEI sebagai organisasi profesi ekonomi tertua yang didirikan oleh Prof. Soemitro Djojohadikoesoemo akan berperan sebagai mitra Pemerintah untuk menghadirkan kembali gagasan, langkah, dan pengaruh ekonomi yang disampaikan oleh Prof. Soemitro Djojohadikoesoemo (Soemitronomics).

Peran ISEI Tingkatkan Produktivitas Ekonom Muda



Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) akan menggelar *Value Chain Competition (VCC)* antar-mahasiswa ekonomi seluruh Indonesia. Kompetisi ini merupakan rangkaian dari kegiatan ISEI Young Economist Festival 2025 yang akan dimulai (kick off) pada 11 Juni 2025 dengan Seminar ISEI hingga digelar Sidang Pleno ISEI 2025 di Kota Manado, Sulawesi Utara, pada September 2025 mendatang.

VCC yang memperebutkan hadiah total Rp125 juta dan Grand Prize Rp25 juta ini merupakan kompetisi membuat value chain analysis report (VCC Report) dan diagram value chain dengan empat komoditas atau sektor pilihan. Keempat komoditas atau sektor pilihan tersebut adalah pertanian (sawit, coklat, kopi), manufaktur (tekstil dan produk tekstil, makanan dan minuman, elektronik), pertambangan (batubara, migas, logam), dan jasa (budaya dan seni, kesehatan, digital service).

Kompetisi ini sangat penting bagi mahasiswa untuk meningkatkan pemahaman dan kreativitas dalam mengembangkan rantai nilai (value chain) dari bahan mentah hingga produk akhir. Makanya, pada kompetisi ini peserta diminta membuat laporan strategi peningkatan nilai tambah (VCC Report), pendekatan inovatif, serta aspek berkelanjutan yang bertujuan untuk memberikan solusi aplikatif dan berdampak dalam pengembangan industri dan perdagangan komoditas.

Selain membuat VCC Report, peserta juga diminta membuat Business Pitch Deck yang merupakan presentasi ringkas yang menjelaskan gambaran umum tentang rencana bisnis atau bisnis yang sudah beroperasi. Business Pitch Deck membantu menyampaikan rencana bisnis kepada calon investor dengan lebih jelas, sehingga dapat meningkatkan ketertarikan calon investor untuk berinvestasi.

"Dalam dunia industri dan perdagangan, rantai nilai memainkan peran penting dalam meningkatkan nilai tambah suatu komoditas. Nah, kompetisi ini mendorong peserta untuk menyusun analisis rantai nilai dengan pendekatan inovatif, memperhitungkan nilai tambah (value added), serta aspek keberlanjutan," ujar Ketua Dewan Pengarah ISEI *Young Economist Festival 2025*, Dr. Aviliani saat konferensi pers di Jakarta, Rabu, 11 Juni 2025.

Sebagai organisasi profesi pertama dan terbesar di Indonesia, kata Solikhin, ISEI memiliki peran yang sangat strategis dalam pengembangan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM), terutama dalam mencetak generasi ekonom muda yang andal. Dalam konteks ini, ISEI terus berusaha menguatkan posisi manajemen talenta muda melalui berbagai program dan kegiatan yang relevan dengan perkembangan ekonomi nasional.

"Salah satu langkah penting yang diambil oleh ISEI adalah melibatkan mahasiswa ekonomi dalam berbagai kompetisi, seperti Value Chain Competition. Kegiatan ini tak hanya memberikan pengalaman praktis yang berharga, tetapi juga mempersiapkan mahasiswa dengan keterampilan analisis yang mendalam, kemampuan beradaptasi dengan dinamika pasar, serta penguasaan berbagai konsep bisnis yang terus berkembang," papar Aviliani. Melalui keterlibatan dalam kompetisi-kompetisi tersebut, kata Avi, ISEI membantu mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan yang sangat dibutuhkan dalam dunia kerja. Kompetisi ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berinovasi, memecahkan masalah bisnis yang kompleks, serta merancang solusi yang dapat diimplementasikan dalam dunia nyata.

"Selain itu, melalui kegiatan ini, mahasiswa juga dapat mempererat jaringan dengan para akademisi, praktisi, dan organisasi profesi lainnya, yang nantinya akan membuka lebih banyak peluang untuk mereka saat memasuki dunia kerja dan berkontribusi secara nyata terhadap pembangunan ekonomi Indonesia. Hadiah dari Kegiatan *Value Chain Competition* ini sebesar Rp125 juta dengan Grand Prize Rp25 juta." ujar Jonathan selaku Analis Muda ISEI

Rangkaian kegiatan ISEI Young Economist Festival 2025 dengan tema "Driving Productivity to Boost Economic Growth" ini akan dimulai (kick off) dengan Talkshow IYEF pada Rabu, 11 Juni 2025, Pengumpulan Karya dan *Mentoring* (20 Agustus 2025), *Training Bootcamp* (30-31 Agustus 2025), *Pitching* dan Penjurian (1 September 2025), dan Pengumuman Pemenang yang akan dilakukan di Sidang Pleno ISEI XXIV di Kota Manado, Sulawesi Utara. (*)



Cek disini untuk informasi selengkapnya



ISEI
Young Economist
Festival

ISEI YOUNG ECONOMIST Festival

"Driving Productivity to Boost Economic Growth"

VALUE CHAIN COMPETITION

Kompetisi membuat value chain analysis report & diagram value chain komoditas pertanian, manufaktur, pertambangan lokal di daerah untuk mendukung pertumbuhan dan akselerasi perekonomian daerah.

PRIZE POOL



125 JUTA

Grand Prize = 25 Juta



KOMODITAS/SEKTOR PILIHAN



Pertanian

Sawit, Coklat, Kopi



Manufaktur

Tekstil dan Produk Tekstil (TPT), Makanan dan Minuman, Elektronik



Pertambangan

Batu Bara, Migas, Logam



Jasa

Budaya & Seni, Kesehatan, Digital Services

TIMELINE KEGIATAN

Pengumpulan Karya & Mentoring

20 Agustus 2025

Pengumuman Pemenang

Sidang Pleno ISEI XXIV

Kick Off Seminar

11 Juni 2025

Training Bootcamp

30 - 31 Agustus 2025

Pitching & Penjurian

1 September 2025

Syarat dan Ketentuan:

- Berusia dibawah 30 tahun
- Peserta boleh dalam kelompok, maksimal 2 orang
- Mengikuti format perlombaan yang terlampir dalam booklet



Link Pendaftaran:
<https://linktr.ee/IYEF2025>

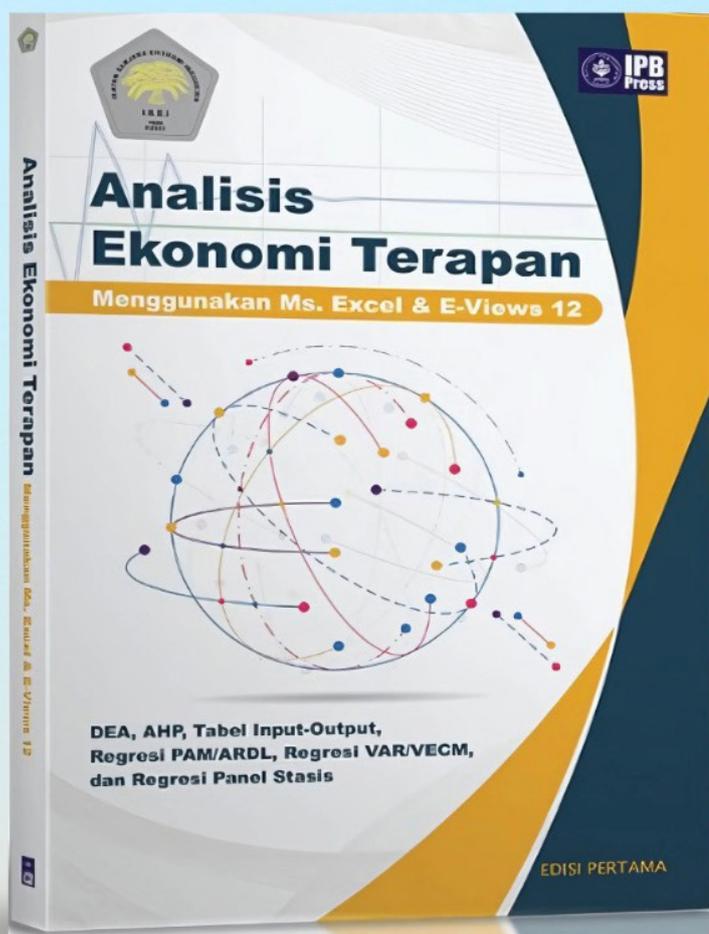


Link Booklet:
bit.ly/BookletIYEF2025



ANALISIS EKONOMI TERAPAN

Menggunakan Ms. Excel & E-Views 12



~~Rp150.000~~

Rp90.000

- Data Envelopment Analysis
- Analytical Hierarchy Process
- Tabel Input-Output
- Regresi PAM/ARDL
- Regresi VAR/VECM
- Regresi Panel Stasis

Pesan Sekarang Sebelum Kehabisan!
Harga promo terbatas hanya Rp90.000!

Stok Terbatas!



Link Pendaftaran:
bit.ly/PemesananBukuISEI

Kontak

+62-882 2734 8958
Jonathan



ppisei_official



PP ISEI



isei.or.id



WARTA ISEI EDISI AGUSTUS

Warta ISEI merupakan publikasi yang membahas fenomena atau isu hangat, penting, dan perkembangan terkini yang ditulis dalam karya tulis populer.

Ketentuan Naskah

- Berisi 800-1.000 kata.
- Menggunakan pedoman PUEBI.
- Berbentuk dokumen word dengan font Tahoma, size 12, single-spaced pada kertas bentuk A4 dengan margin halaman 3 cm.
- Dapat melampirkan gambar yang terkait dengan konten naskah.

Tema Naskah

Pendidikan Unggulan dan Profesi

Pengiriman Naskah

warta@isei.or.id

Deadline: 15 Agustus 2025

Contact Person

 +62 821-1273-4541 (Firman S.P.)

 @ppisei_official

Template Naskah



bit.ly/publikasiwartaisei

Tertarik Beriklan di Warta ISEI?



bit.ly/MediaOrderWartaisei



WARTA ISEI

Sinergi dan Kolaborasi Pusat dan Daerah

Volume 2 No. 3 | Juni 2025



IKATAN SARJANA EKONOMI INDONESIA

Gedung Kantor Pusat ISEI

Jl. Daksa IV No. 9, Jakarta 12110

Telp : (021) 2277 2577

Fax : (021) 720 1812

E-mail : isei.pusat@gmail.com

 [ppisei_official](#)

 [PP ISEI](#)

 isei.or.id